

**PERBANDINGAN KONTRIBUSI INDUSTRI PARIWISATA DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG DAN
JEMBER**



Disusun Oleh:

Dr. Elizabeth Tiur Manurung M.Si., CA (UNPAR)

Dr. Siti Komariah (Univ Negeri Jember JATIM)

Arthur Purboyo Drs., Akt., MPAc (UNPAR)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas Katolik Parahyangan

2014

DAFTAR ISI

ABSTRAK	Hal 4
BAB I PENDAHULUAN	Hal 5
1.1 Latar Belakang	Hal 5
1.2 Pertanyaan Peneliti	Hal 6
1.3 Tujuan Peneliti	Hal 7
1.4 Urgensi Penelitian	Hal 7
1.5 Kerangka Pemikiran	Hal 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Hal 11
2.1 Pendapatan Asli Daerah	Hal 11
2.2 Sektor Pariwisata	Hal 20
2.3 Sektor Pariwisata Kabupaten Bandung	Hal 26
2.4 Sektor Pariwisata Kabupaten Jember	Hal 28
BAB III METODE PENELITIAN	Hal 33
BAB IV JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN	Hal 38
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	Hal 39
5.1 Mengenal Kabupaten Bandung dan Jember	Hal 39
5.1.1 Kabupaten Bandung	Hal 39
5.1.2 Kabupaten Jember	Hal 44
5.2 Konfigurasi Pendapatan Asli Daerah	Hal 45
5.3 Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah (SIMPATDA)	Hal 53
5.4 Signifikansi Kontribusi Industri Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Jember	Hal 56
5.5 Faktor-Faktor Pendorong Berkembangnya Industri Pariwisata Di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Jember	Hal 61
5.6 Karakteristik Komparatif Sektor Wisata di Kabupaten Bandung Dan di Kabupaten Jember	Hal 64
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	Hal 69
Usulan Kebijakan Pengembangan Sektor Pariwisata	Hal 69

Di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Jember

DAFTAR PUSTAKA

Hal 72

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami lebih mendalam bagaimana Sektor Pariwisata dapat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Jember.

Melalui penggunaan metode penelitian Deskriptif Analitis, dan dengan menggunakan data PAD Kabupaten Bandung dan Jember periode 2003 – 2013 serta hasil wawancara dengan para wisatawan, wawancara dengan Dirjen Pariwisata, Bagian Akuntansi dan Pelaporan Bagian Keuangan Provinsi JABAR, Kantor Kabupaten, Dispenda, serta para pihak yang terkait maka hasil pembahasan dan pengolahan data dapat disimpulkan sebagai berikut.

Kesimpulan menunjukkan PAD Kabupaten Bandung dan Jember masing-masing selama kurun waktu Tahun 2000 – 2013 telah terjadi kenaikan yang sangat signifikan yaitu 10 kali lipat di Kabupaten Bandung serta 15 kali lipat di Kabupaten Jember. Sedangkan pengaruh pendapatan dari Industri Pariwisata terhadap PAD yaitu sebesar 16,34% ($p = 0,002$) dan 17,64% ($p = 0,000$) masing-masing untuk Kabupaten Bandung dan Jember. Dengan korelasi (Pearson) sebesar 77% dan 95,9%.

Pengaruh pendapatan Industri Pariwisata terhadap PAD baik di Kabupaten Bandung dan Jember yang sangat signifikan di atas, menjadi pemicu untuk lebih fokus dalam mengembangkan sektor wisata. Dan berdasarkan pengolahan SWOT tentang pariwisata, Faktor-faktor yang menjadi strategi untuk mengembangkan sektor pariwisata diantaranya untuk Kabupaten Bandung: wisata berbasis keunggulan lokal misalnya berbasis alam, kuliner, seni & budaya, belanja dan menjadi perpanjangan tangan pariwisata Kota Bandung. sedangkan untuk Kabupaten Jember, diantaranya memperbanyak program kepariwisataan yang menarik seperti Jember Fashion Carnaval yang kreatif dan inovatif karena dianggap telah menyaingi carnival Rio de Janeiro.

Kata Kunci : Sektor Pariwisata, Pendapatan asli Daerah, SWOT analysis, Kebijakan tentang pariwisata

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, dewasa ini telah terasa secara nyata. Pasar global ASEAN yang semakin mendominasi pasar nasional, telah mengakibatkan meningkatnya persaingan yang semakin tajam di dunia bisnis. Tujuan MEA 2015 diantaranya: (1) menciptakan kesatuan dan pasar tunggal yang berbasis produksi ASEAN; (2) tercapainya integrasi produksi ASEAN. (Kompas: 6/12/13: Hal. 18). Tujuan ini akan disertai dengan terjadinya arus bebas barang dan jasa, faktor produksi, investasi, modal, penghapusan tarif perdagangan antar Negara-Negara ASEAN.

Salah satu dampak pasar global adalah menurunnya peran sektor industri khususnya yang tidak memiliki keunggulan kompetitif karena tidak dapat bersaing di pasar global. Turunnya kontribusi sektor industri ditunjukkan pada data berikut sebagai bahan perbandingan. Data empiris per akhir Januari 2014 menunjukkan bahwa di Propinsi Jawa Barat saja terdapat 289 perusahaan yang menyatakan tidak mampu membayar kenaikan upah minimum Kabupaten disebabkan mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut (Tahun 2012 dan 2013), artinya selama kurun waktu tersebut kinerja perusahaan di wilayah Kabupaten Bandung dan dalam lingkup Jawa Barat telah turun sangat drastis sehingga tidak dapat bersaing. Dari 289 perusahaan tersebut, 80% nya adalah perusahaan padat karya misalnya industri garmen, alas kaki, tekstil, dan produksi hasil tekstil lainnya (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi: seperti dikutip: Bisnis Bandung: 30/1/14). Sehingga untuk dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi, haruslah dicari alternatif pendapatan dari sektor lain yang dapat dikembangkan yang akan menghasilkan keunggulan kompetitif.

Pembangunan ekonomi suatu Negara dapat dilakukan dengan cara peningkatan pertumbuhan ekonominya. Kegiatan peningkatan pertumbuhan perekonomian ini terkait dengan peningkatan perekonomian daerah termasuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di samping pengelolaan terhadap sumber PAD, suatu daerah juga harus kreatif untuk mengelola sumber-sumber PAD yang dimiliki, sehingga dengan adanya pengelolaan yang lebih serius terhadap sumber-sumber PAD maka akan semakin banyak pula pendapatan yang akan dipergunakan untuk membangun suatu daerah.

Salah satu upaya peningkatan PAD yakni dengan mengelola sumber daya yang ada di suatu wilayah, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya potensial/basis diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. Sektor basis merupakan sektor yang secara potensial dapat diunggulkan guna meningkatkan pertumbuhan

ekonomi suatu wilayah. Dengan adanya sektor basis dalam suatu wilayah maka akan memberikan keuntungan terciptanya arus pendapatan ke wilayah yang bersangkutan. Sektor basis yang terdapat di tiap-tiap wilayah akan berbeda dengan wilayah lain, hal ini yang menyebabkan tiap-tiap daerah memiliki perbedaan dalam kebijakan pengembangan sektor basis diwilayahnya. Suatu daerah bisa memiliki lebih dari satu sektor basis diantaranya sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan suatu sektor yang menarik untuk dikembangkan guna mencapai pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, karena sektor pariwisata di sini dapat menyerap sumberdaya alam dan sumber daya manusia secara bersama-sama.

Pendapatan suatu daerah wisata, merupakan salah satu sumber dari PAD yang penting. Sampai akhir Tahun 2013 kontribusi sektor pariwisata dalam PAD sebesar 70% untuk wilayah Kota Bandung, sebagai contoh (Lumanauw, dalam Rikiran Rakyat: 1/2/14: Hal. 22). Maka bila sektor pariwisata dapat dikembangkan dengan baik, akan menghasilkan pendapatan yang meningkat, dan pada gilirannya akan meningkatkan PAD di wilayah tersebut. Bila wilayah tersebut memperoleh PAD yang lebih besar maka pembiayaan pembangunan di wilayah tersebut akan meningkat pula, sehingga fasilitas publik akan semakin baik serta masyarakat akan semakin sejahtera.

Perbandingan data antara Kabupaten Bandung dan Jember diharapkan dapat menjadi acuan bagi masing-masing wilayah agar dapat mengembangkan wilayahnya dengan lebih baik. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Bandung sangat terkenal dengan kreativitas masyarakatnya sehingga tumbuh berbagai macam wisata yang berhasil, misalnya wisata kuliner, belanja, sejarah, kebudayaan, pendidikan dan wisata lainnya, sedangkan Kabupaten Jember terkenal dengan *Jember fashion Week* nya. Masing-masing wilayah dapat saling belajar satu sama lain sehingga tiap wilayah dapat berkembang dengan optimal, dan pada gilirannya PAD masing-masing wilayah dapat dimaksimalkan. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul:

Oleh Karena itu penelitian ini mengangkat judul: “ PERBANDINGAN KONTRIBUSI INDUSTRI WISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG DAN JEMBER”

1.2 Pertanyaan Penelitian

Pada penelitian ini diajukan berbagai pertanyaan sebagai bentuk permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

- (1) Bagaimanakah Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung dan Jember
- (2) Sejauhmanakah infrastruktur Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPATDA) yang digunakan di Kabupaten Bandung dan Jember dapat menunjang pengelolaan PAD

- (3) Apakah kontribusi Industri pariwisata terhadap PAD Kabupaten Bandung dan Jember signifikan secara statistik
- (4) Faktor-faktor apakah yang dapat mendorong berkembangnya Industri pariwisata di Kabupaten Bandung dan Jember

1.3 Tujuan Penelitian

- (1) Untuk mengetahui bagaimanakah Perkembangan Pendapatan industri pariwisata di Kabupaten Bandung dan Jember
- (2) Untuk mengetahui sejauhmanakah infrastruktur Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPATDA) yang digunakan di Kabupaten Bandung dan Jember dapat menunjang pengelolaan PAD
- (3) Untuk mengetahui apakah kontribusi industri pariwisata terhadap PAD Kabupaten Bandung dan Jember signifikan secara statistik
- (5) Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang dapat mendorong berkembangnya Industri pariwisata di Kabupaten Bandung dan Jember

1.4 Urgensi Penelitian

- (1) Fakta menunjukkan bahwa adanya Era Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015, mengakibatkan meningkatnya persaingan bisnis lebih tajam. Sektor industri yang tidak memiliki keunggulan kompetitif akan sulit bersaing, sehingga perlu dicari sektor lain yang potensial untuk mempertahankan perekonomian. Salah satu sektor alternatif adalah sektor pariwisata karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang kaya dan indah. Itulah mengapa sektor pariwisata menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut.
- (2) Sektor pariwisata di Kabupaten Bandung dan Jember seperti yang kita sadar, telah menunjukkan sebagai sektor yang mampu menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi signifikan dari tahun ke tahun, sehingga analisis untuk mengembangkannya penting untuk dilakukan guna mencapai peningkatan ekonomi daerah.
- (3) Kabupaten Bandung dan jember memiliki potensi pariwisata yang besar yang dapat menunjang peningkatan PAD lebih tinggi. Masing-masing Kabupaten dapat saling belajar/mem-*benchmark* untuk meningkatkan potensi pariwisatanya sehingga lebih berkembang, sehingga kontribusi pendapatannya terhadap PAD dapat ditingkatkan.

- (4) Infrastruktur pengelolaan PAD memerlukan pengembangan dan pengendalian pula, agar jumlah pendapatan yang diterima dapat dioptimumkan, sehingga pelayanan kepada masyarakat (IMPATDA) yang digunakan di Kabupaten Bandung dan Jember
- (5) Pengembangan sektor pariwisata ditekankan pada faktor-faktor utama yang mempengaruhi pengembangan sektor pariwisata. Dengan demikian sektor ini akan menghasilkan pendapatan yang meningkat sehingga meningkatkan pula PAD masing-masing Kabupaten.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dampak adanya pasar global, telah nyata meningkatkan persaingan pasar dengan sangat tajam. Dunia usaha dituntut untuk mencari cara baru ataupun bisnis baru untuk dapat mempertahankan keberlangsungan pendapatan usahanya. Kenyataannya telah disadari pula bahwa mencapai keunggulan kompetitif di berbagai sektor tidaklah mudah, karena banyak faktor yang berkaitan yang mesti dikembangkan. Sehubungan dengan hal itu, maka kita patut mencari sektor alternatif lain yang potensial yang dapat dikembangkan untuk dapat dihasilkan keunggulan kompetitif yang berbeda.

Negara Indonesia sebagai Negara Kepulauan dengan kekayaan, keindahan alam yang menakjubkan, keberagaman budayanya, serta keramahan penduduknya, telah menjadi tujuan wisata yang penting bagi berbagai turis manca Negara. Fakta ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Indonesia dapat menjadi sektor potensial untuk menghasilkan devisa bagi Negara, selain dapat meningkatkan pendapatan dari wisatawan domestik sendiri.

Perkembangan ekonomi suatu Negara, berasal pula dari pendapatan yang diperoleh masing-masing daerah. Pendapatan masing-masing daerah ditunjukkan oleh PAD nya yaitu Pendapatan Asli Daerah yang diartikan sebagai Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah bersangkutan, terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009).

Salah satu unsur PAD dapat berasal dari pendapatan tiket memasuki suatu area tertentu, yang didalamnya dapat memiliki area Hiburan, Restoran, area Parkir dan lain-lain, yang mana termasuk ke dalam area ini adalah daerah wisata. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang PAD 1 Januari 2011, bahwa unsur PAD terdiri dari: (1) Pajak Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan/atau keramaian yang memerlukan tiket masuk (misalnya tempat wisata), Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak BPHTB, Pajak PBB; (2)

Pendapatan Restribusi Daerah atas izin tertentu; (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; (4) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, sesuai dengan undang-undang.

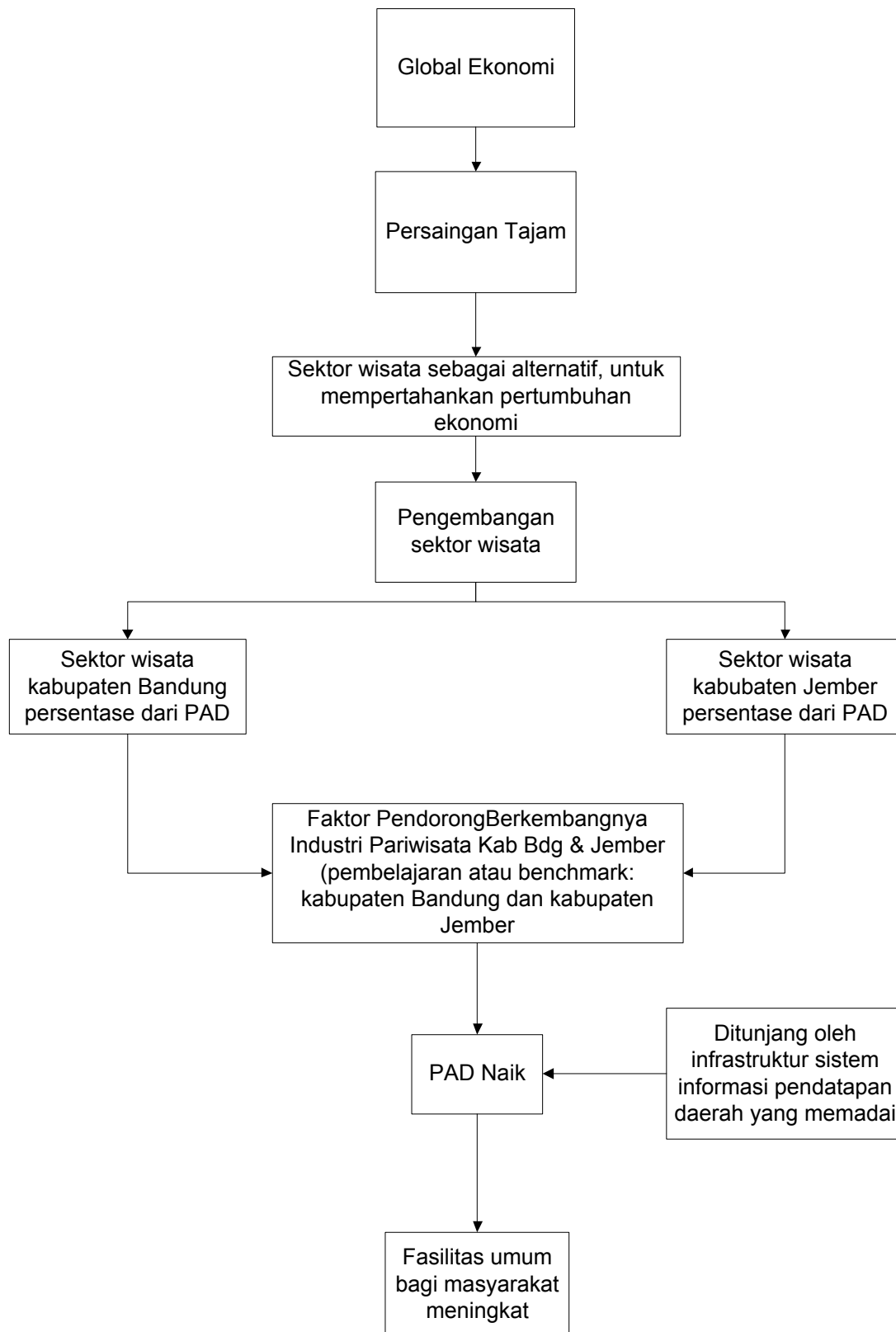
Kenyataannya dewasa ini, pendapatan sektor pariwisata sangatlah signifikan dalam PAD di berbagai wilayah. Maka bila sektor pariwisata diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan PAD di berbagai wilayah, memanglah patut dipertimbangkan mengingat bila sektor pariwisata dapat dikembangkan lebih baik lagi di masa yang akan datang, maka pendapatan dari sektor ini pun dapat ditingkatkan dan PAD di berbagai wilayah akan meningkat pula. Hal ini tidak terkecuali pada Kabupaten Bandung dan Jember.

Perkembangan suatu kawasan wisata dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut ada yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung, ada yang dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah maupun tidak dapat dikendalikan. Sehingga pada penelitian ini akan dianalisis pula faktor-faktor apa saja yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kemajuan suatu daerah wisata baik di Kabupaten Bandung maupun Jember. Bila suatu kawasan wisata dapat dikembangkan secara optimum maka diharapkan pendapatan dari sektor wisata tersebut akan naik pula, yang mana pada gilirannya akan meningkatkan PAD wilayah tersebut, termasuk meningkatnya pendapatan masyarakat yang terkait dengan kawasan wisata tersebut.

Infrastruktur pengelolaan PAD sebagai salah satu factor yang menangani pengelolaan PAD memerlukan pengembangan dan pengendalian pula, agar jumlah pendapatan yang diterima tercatat dan dapat diterima dengan tepat, serta dapat dioptimumkan, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Pada beberapa Kabupaten system yang digunakan disebut SIMPATDA yang telah menggunakan teknologi sebagai basisnya

Meningkatnya PAD di wilayah tertentu, akan menggiatkan pembangunan daerah tersebut. Umumnya PAD suatu wilayah digunakan untuk membelanjai Kebutuhan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, meningkatkan perekonomian, dan suprastruktur seperti di Kabupaten Bandung. Sebagai perbandingan Nilai PAD Kabupaten Cimahi sebesar Rp. 182,4 M diprioritaskan untuk digunakan dalam meningkatkan Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur agar masyarakat dapat menerima manfaat sebesar-besarnya (Pikiran Rakyat: 11/1/14: Hal. 5).

Kerangka berpikir yang telah diuraikan sebelumnya, bila ditunjukkan dalam skema nampak sebagai berikut ini.



Skema 1 Uraian Kerangka Berpikir

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah.

Pembangunan Daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya- sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sector swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru, dan merangsang kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Pernan pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya selain dalam bentuk sarana dan prasarana fisik, juga dapat berbentuk subsidi langsung, yang juga tidak kalah penting adalah memberikan bimbingan teknis dan non teknis secara terus menerus kepada masyarakat yang sifatnya mendorong dan memberdayakan masyarakat, agar dapat merencanakan, membangun, dan mengelola sendiri prasarana dan sarana untuk mendukung upaya percepatan pembangunan.

Salah satu pengukuran berhasilnya pembangunan di suatu daerah adalah melalui Berapa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh suatu wilayah tertentu. Oleh karena itu, Ketepatan dan kelengkapan PAD yang dihasilkan mestilah terkelola dengan baik. Pengelolaan keuangan daerah diharapkan memenuhi prinsip Keadilan, Proporsional, Demokratis, Transparan, bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan Potensi Daerah, Kondisi, dan Kebutuhan daerah (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004).

Pendapatan Asli Daerah diartikan sebagai Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009)

Undang-Undang PDRD ttg pajak dan Retribusi Daerah yg berlaku mulai 1 Januari 2011 menyatakan bahwa sumber pendapatan Asli daerah terdiri dari: (1) Pajak Daerah, Pajak atas pelayanan Hotel, Pajak atas pelayanan Restoran, Pajak penyelenggaraan Hiburan dan/atau keramaian yang memerlukan tiket masuk (misalnya tempat wisata), Pajak atas penyelenggaraan Reklame, Pajak Penerangan Jalan/ penggunaan tenaga listrik (yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah), Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak BPHTB, Pajak PBB ; (2) Pendapatan Retribusi Daerah, yang merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah baik untuk kepentingan pribadi ataupun badan; (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (4) Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang sah, antara lain hibah, dana darurat dan penerimaan lainnya sesuai dengan undang-undang.

Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk membelanjai: Kebutuhan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Ekonomi dan Suprastruktur. Tujuan belanja Daerah ini untuk melaksanakan urusan pemerintah dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat, serta menyajikan pelayanan kepada masyarakat dengan pembelanjaan mandiri. Semakin banyak potensi dan peluang usaha yang dapat dikembangkan, maka semakin besar kesempatan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Definisi lain mengenai Pendapatan Asli Daerah, (<http://nanangbudianas.blogspot.com/2013/02/pendapatan-asli-daerah.html>; diunduh 16/6/2014 Pk. 10.07), menurut Abdul Halim (2002) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sedangkan (Mardiasmo, 2002). Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari tahun ke tahun kebijakan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap daerah provinsi, kabupaten dan kota relatif tidak banyak berubah. Artinya, sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) komponennya itu-itu juga yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba dari BUMN. Hal ini lebih dipengaruhi oleh kebijakan Fiscal (national Fiscal Policy) pemerintah pusat mengandalkan penerimaan jenis pajak yang “subur” untuk kepentingan nasional.

Desentralisasi digulirkan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah menciptakan “kreativitas baru” mengembangkan dan meningkatkan jumlah penerimaan PAD nya. Akan tetapi, apakah dengan peningkatan PAD Pemerintah Daerah (pemda) mampu melaksanakan seluruh kewenangannya? Apakah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Desentralisasi atau Otonomi Daerah?

Selama Pendapatan Asli Daerah (PAD) benar-benar tidak memberatkan atau membebani masyarakat lokal, Investor lokal, maupun Investor asing, tentu tidak masalah. Dan dapat dikatakan bahwa daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat setiap tahun mengindikasikan daerah tersebut mampu membangun secara mandiri tanpa tergantung dana pusat.

Sebaliknya jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru berdampak terhadap perekonomian daerah yang tidak berkembang atau semakin buruk, maka belum dapat dikatakan keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pemahaman kemana sebenarnya pergerakan Otonomi Daerah, masih kurang. Mereka berfikir Otonomi Daerah hanya untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar-besarnya. Itu persepsi yang salah. Tujuan dan sasaran pemberian Otonomi Daerah dalam artian wewenang yang luas kepada Kabupaten dan Kota adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mempertimbangkan bahwa ini sangat memberatkan masyarakat lokal, investor lokal dan investor asing, justru menghambat perkembangan perekonomian daerah terutama dalam era kompetitif yang berlaku sekarang. Dimana pelayanan terbaik dan iklim usaha yang kondusif ikut menentukan investasi di daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu:

- a. Pajak Daerah.
- b. Retribusi Daerah.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang di Pisahkan.
- d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Ad a. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pajak secara umum adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara pemerintah berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung

Berdasarkan UU No 34 Tahun 2000 yang dimaksud dengan "Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah"

Dari definisi diatas jelas bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan kepada setiap orang (wajib pajak) tanpa terkecuali. Ditegaskan pula bahwa hasil pajak daerah ini diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pada Tanggal 18 Agustus 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-undang, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Pengesahan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) ini sangat strategis dan mendasar di banding desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-undang yang baru ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010.

UU PDRD ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggungjawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.
3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipergunakan dalam penyusunan UU ini yaitu :

1. Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional.
2. Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam undang-undang.
3. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
4. Pemerintah daerah tidak dapat memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam Undang-Undang sesuai kebijakan pemerintah daerah.
5. Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakuakn secara preventif dan korektif. Rancangan peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi harus dapat persetujuan pemerintah sebelum ditetapkan menjadi Perda. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dikenakan sanksi.

Materi yang diatur dalam UU PDRD yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2009 adalah sebagai berikut :

Penambahan pajak daerah.

Pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai mana dibawa ini:

- a. Jenis Pajak Propinsi terdiri atas:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - 4) Pajak Air Permukaan; dan
 - 5) Pajak Rokok.
- b. Jenis Pajak Kabupaten dan Kota terdiri atas:
 - 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Penerangan Jalan;
 - 6) Pajak Mineral Bukan logam dan Bebatuan; 7) Pajak Parkir;
 - 8) Pajak Air Tanah;
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Ada empat jenis pajak baru bagi daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat, dan Pajak Sarang burung Walet yang ditetapkan sebagai pajak Kabupaten dan Kota. Selain itu pajak rokok ditetapkan sebagai pajak provinsi. Berarti ada 4 jnis pajak daerah, yaitu 1 pajak provinsi dan 3 jenis pajak Kabupaten dan Kota. Dengan tambahan tersebut secara keseluruhan ada 16 jenis pajak daerah, yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten dan kota.

- a) Pajak Rokok

Pajak rokok dikenakan atas cukai yang ditetapkan oleh pemerintah. Hasil penerimaan pajak Rokok tersebut sebesar 70% dibagikan kepada kabupaten dan kota di propinsi yang bersangkutan.

Selain itu, penerimaan Pajak Rokok dialokasikan minimal 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan (pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (semoking area), kegiatan memasyarakatkan mengenai bahaya merokok, dan iklan layanan, masyarakat mengenai bahaya rokok.

b) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran

Selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB sektor pedesaan dan perkotaan diahlikan menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan menjadikan PBB Pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD)

c) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)

Selama ini BPHTB merupakan pajak pusat, namun seluruh hasilnya di serahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan daerah BPHTB menjadi pajak daerah.

d) Pajak Sarang Burung Walet

Merupakan pajak baru, dipungut daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis dari keberadaan dan perkembangan sarang burung walet di wilayahnya.

b. Retribusi Daerah

Rertibusi atau perizinan yang diperoleh dalam Undang-Undang, sebagai penerimaan yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Perbedaan antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak hanya didasarkan atas objeknya, tetapi juga perbedaan atas pendekatan tarif. Oleh karena itu, tarif rertibusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya.

Penambahan Jenis retribusi Daerah, Retribusi daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

a. Retribusi Jasa Umum, yang meliputi:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan; 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- 4) Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar; 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 9) Retribusi Penggantian biaya Cetak Peta;
- 10) Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus;
- 11) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair; 12) Retribusi Tera/Tera ulang;
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan 14) Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi

Ad b. Retribusi Jasa Khusus, yang meliputi:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah; 2) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan; 4) Retribusi Terminal;
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir; 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/villa;
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan; 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 10) Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

Ad c. Retribusi Perizinan Tertentu

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 3) Retribusi Izin Gangguan;
- 4) Retribusi Izin Trayek; dan 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan;

Terdapat penambahan 4 jenis retribusi daerah, yaitu:

a) Retribusi Tera/Tera Ulang - Pengenaan Retribusi Tera/Tera Ulang dimaksudkan untuk membiayai fungsi pengendalian terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya oleh masyarakat. Dengan pengendalian tersebut , alat ukur, takaran, dan timbangan akan berfungsi dengan baik, sehingga penggunaannya tdk merugikan masyarakat.

b) Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi - Pengenaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan pengendalian daerah terhadap pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi. Dengan pengendalian ini, keberadaan menara telekomunikasi akan memenuhi aspek tata ruang, keamanan, dan keselamatan, keindahan sekaligus memberikan kepastian bagi pengusaha. Untuk menjamin agar pungutan daerah tidak berlebihan, tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak melampaui 2% dari nilai jual Objek Pajak PBB menara telekomunikasi.

c) Retribusi Pelayanan Pendidikan - Pengenaan retribusi pelayanan pendidikan dimaksudkan agar pelayanan pendidikan, di luar pendidikan dasar dan menengah, seperti pendidikan dan pelatihan untuk keahlian khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan pungutan dan hasilnya digunakan untuk membiayai kesinambungan dan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dimaksud.

d) Retribusi Izin Usaha Perikanan - Pengenaan Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak akan memberikan beban tambahan bagi masyarakat, karena selama ini jenis retribusi tersebut telah dipungut oleh sejumlah pemerintah daerah sesuai dengan kewenagannya. Sebagaimana halnya dengan jenis retribusi lainnya, pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan dimaksudkan agar pelayanan dan pengendalian kegiatan di bidang perikanan dapat terlaksanakan secara terus menerus dengan kualitas yang lebih baik.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan.

Hasil kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup : 1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan Milik Daerah/BUMD; 2. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan Milik Negara/BUMN ; 3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan Milik Swasta atau kelompok masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah (Pemda). Rekening ini disediakan untuk mengakuntansi penerimaan daerah selain yang disebutkan diatas. Pendapatan Asli Daerah lainnya yang disahkan seperti penjualan asset tetap daerah, pendapatan denda pajak dan jasa giro.

(<http://nanangbudianas.blogspot.com/2013/02/pendapatan-asli-daerah.html>; diunduh 16/6/2014 Pk. 10.07).

Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPATDA)

Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPATDA) adalah sebuah sistem informasi manajemen pendapatan daerah yang berfungsi membantu proses di dalam dinas pendapatan daerah dalam mengelola pendapatan daerah. SIMPATDA umumnya menggunakan software yang diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah, guna menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan dan retribusi daerah sehingga dapat tertata dengan rapi sejauh mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dicapai. SIMPATDA melingkupi: (1) Pendataan Objek Pajak; (2) Memproses penghitungan pajak; (3) perhitungan jumlah pajak terpisah atau menyeluruh; (4) pelaporan perpajakan.

Tujuan adanya Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah pada Dispenda Kota Bandung, untuk meningkatkan menyampaikan informasi kebijakan, untuk mempermudah menyelesaikan pengelolaan dan pengukuran sejauh mana PAD telah tercapai. Aparatur Dispenda biasanya menyampaikan informasi tentang perpajakan baik secara langsung maupun melalui jaringan berbasis data-based, informasi tersebut diantaranya: (1) Pendaftaran wajib pajak/retribusi daerah; (2) pengolahan data perpajakan; (3) menghitung potensi pajak/retribusi; (4) proses pembukuan dan pelaporan wajib pajak; (5) informasi jenis persyaratan.

2.2 Sektor Pariwisata

Definisi Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor yang diharapkan memiliki produk-produk yang dapat mendukung sektor-sektor lain dan menggerakkan sendi perekonomian daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui restribusi dan pajak. Sektor pariwisata yang berkontribusi cukup signifikan pada Pendapatan Negara ditunjukkan dalam data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif RI Tahun 2011, sektor pariwisata menempati urutan terbesar kelima memberikan kontribusi pada pendapatan Negara Indonesia. Kontribusi yang diberikan (dalam US \$) sebesar 8,554.40 dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 7,603.45.

Berdasarkan Undang-undang no 9 tahun 1990 tentang kegiatan kepariwisataan, yaitu wisata adalah kegiatan perjalanan / sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati daya tarik obyek wisata. Dalam hal ini pemerintah berusaha untuk menggalakkan pariwisata untuk ditingkatkan karena pariwisata merupakan penyumbang devisa negara yang cukup besar.

Secara etimologis, kata “pariwisata” berasal dari bahasa sansekerta. Kata pariwisata terdiri dari dua suku kata yaitu kata “pari” yang artinya banyak, berkali-kali, berputar-putar dan lengkap. Serta kata

“wisata” yang artinya perjalanan, bepergian dalam hal sinonim dengan kata travel dalam bahasa Inggris (Yoeti, 1990 :103). Menurut Prof. Hans Buchli, kepariwisataan adalah “setiap peralihan tempat yang bersifat sementara dari seseorang atau beberapa orang, dengan maksud memperoleh pelayanan yang diperuntukkan bagi kepariwisataan itu oleh lembaga–lembaga yang digunakan untuk maksud tersebut”. (Yoeti,1987:107).

Sebagai suatu produk, wisata memiliki ciri-ciri yang khas yang membedakan produk pada umumnya. Ciri-ciri tersebut antara lain sebagai berikut: tidak berwujud (intangible); tidak memiliki ukuran kuantitatif (unmeasurable); tidak tahan lama dan mudah kadaluarsa; tidak dapat disimpan (unstorable); melibatkan konsumen (wisatawan) dalam proses produksinya; proses produksi dan konsumsi terjadi dalam waktu yang sama. (Suyitno 2001 : 10)

Suatu obyek pariwisata harus memenuhi tiga kriteria agar obyek tersebut diminati pengunjung, yang pertama adalah *something to see* adalah obyek wisata tersebut harus mempunyai sesuatu yang bisa di lihat atau di jadikan tontonan oleh pengunjung wisata. obyek tersebut harus mempunyai daya tarik khusus yang mampu untuk menarik minat dari wisatawan untuk berkunjung. Kedua, *something to do* adalah agar wisatawan yang melakukan pariwisata di sana bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk memberikan perasaan senang, bahagia, berupa fasilitas rekreasi baik itu arena bermain ataupun tempat makan, terutama makanan khas dari tempat tersebut sehingga mampu membuat wisatawan lebih betah untuk tinggal. Kriteria terakhir yaitu, *something to buy* adalah fasilitas untuk wisatawan berbelanja yang pada umumnya adalah ciri khas atau ikon dari daerah tersebut, sehingga bias dijadikan sebagai oleh-oleh (Yoeti, 1985, p.164).

Salah satu karakter dari sektor pariwisata adalah multiplier effect, berarti memiliki dampak ke depan dan ke belakang yang panjang. Pada hakekatnya pembangunan dan pengembangan kepariwisataan (Yoeti: 2001) merupakan upaya untuk mengembangkan objek dan daya tarik pariwisata, yang terwujud dalam bentuk keindahan, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan budaya, serta peninggalan sejarah dan purbakala. Pemanduan objek dan daya tarik wisata dengan pengembangan usaha jasa dan sarana pariwisata akan berfungsi meningkatkan daya tarik wisatawan maupun pengembangan objek dan daya tarik wisata baru, yang perlu didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana yang memadai.

Menurut Kartajaya dan Yuswohadi (2005), aktivitas yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pariwisata adalah menyusun kerangka kesempatan berkembangnya pariwisata yang merupakan strategi pengembangan komprehensif Daerah Tujuan Wisata, agar pengembangan di masa yang akan datang, dapat terorganisasi dan terarah ke kawasan-kawasan geografis yang tepat

dengan prioritas yang tepat. Sedangkan kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menyatakan pengembangan daerah tujuan wisata, adalah konsep secara terpadu dan terstrukturisasi dengan peran aktif masyarakat pariwisata (asosiasi, industri, pendidikan, pemerintah, ahli dan peminat pariwisata) yang concern dengan dunia kepariwisataan dalam upaya menaikkan jumlah kunjungan wisatawan serta meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata (tourist management) .

Menurut Kartajaya dan Yuswohadi (2005), agar kunjungan wisatawan dapat meningkat, ada 5 unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata, antara lain: (a) Objek dan daya tarik wisata, (b) prasarana wisata, (c) Sarana wisata, (d) daya laksana (pelayanan, keamanan, dan kenyamanan, (e) masyarakat dan lingkungan.

Sejalan dengan pernyataan di atas, keberhasilan dalam pengelolaan objek wisata alam dapat dilihat dari jumlah kedatangan wisatawan. Jumlah kedatangan wisatawan ini, dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya:

- (1) Faktor pelayanan, pernyataan wisatawan tentang sikap dan perilaku dalam memberikan jasa pelayanan, pemanduan dan informasi kepada wisatawan ditunjukkan dengan indikator (a) reliabilitas, (b) responsif, (c) jaminan, (d) empati dan nyata pada objek atau daerah tujuan wisata
- (2) Faktor sarana prasarana, yaitu pernyataan wisatawan tentang fasilitas yang mendukung kelancaran aktivitas wisatawan selama berada di lokasi objek wisata
- (3) Faktor objek dan daya tarik wisata alam, adalah potensi yang berbasis pengembangan wisata alam yang bertumpu pada potensi utama sumber daya alam (Natural and Cultural Based Tourism)
- (4) Faktor keamanan, yaitu tingkat gangguan/ kerawanan keamanan di suatu objek wisata alam akan mempengaruhi ketenangan dan kenyamanan wisatawan selama berada di lokasi objek wisata alam tersebut, disamping dapat mempengaruhi keputusan wisatawan tentang layak tidaknya objek wisata tersebut dikunjungi.

Perkembangan Pariwisata di suatu daerah tidak terlepas dari peran aktif berbagai unsur, termasuk pelaku usaha pariwisata, misalnya: agen Travel, pengusaha hotel, pengusaha transportasi, pengelola kawasan wisata.

Tujuan Berwisata

Istilah pariwisata dihubungkan erat pula dengan pengertian perjalanan wisata yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan

bukan untuk kegiatan yang menghasilkan upah. Perjalanan wisata dapat dilakukan oleh seorang atau lebih, dengan tujuan:

(a) Rekreasi (Recreational Tourism)

Perjalanan wisata untuk tujuan beristirahat dan memulihkan kembali kesegaran, baik fisik maupun mental. Biasanya dilakukan dengan mengunjungi atau tinggal beberapa hari di tempat yang memberikan ketenangan dan rasa rileks, seperti: pantai, pegunungan, dan sebagainya.

(b) Menikmati Perjalanan (Pleasure Tourism)

Orang-orang bepergian dari tempat tinggalnya untuk memenuhi rasa ingin tahu, mencari udara segar, menurunkan ketegangan syaraf, menikmati keindahan alam, menikmati keramaian kota, sesuai dengan kebutuhan yang ingin dipuaskan berdasarkan karakter dan latar belakang masing-masing individu

(c) Pariwisata Budaya (Culture Tourism)

Perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas wawasan dengan melakukan jalan penelitian, mempelajari kebiasaan dan adat istiadat suatu daerah/bangsa, mengunjungi monument sejarah, mengunjungi pusat kesenian, mengikuti festival dan sebagainya

(d) Pariwisata Olahraga (Sport Tourism)

Kegiatan perjalanan yang ada kaitannya dengan kegiatan olah raga, baik dilakukan sendiri maupun sebagai penonton

(e) Pariwisata Kesehatan (Health Tourism)

Perjalanan dengan tujuan untuk pengobatan atau untuk memulihkan kesehatan dengan mengunjungi tempat-tempat peristirahatan, Air panas, atau tempat yang sejuk dan segar

(f) Pariwisata Komersial (Business Tourism)

Perjalanan ini ada kaitannya dengan pekerjaan termasuk mengunjungi pameran, mengikuti workshop, ataupun perdagangan

(g) Pariwisata Agama (Religious Tourism)

Perjalanan yang dilakukan individu atau kelompok dengan mengunjungi tempat ibadah/suci dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa.

Pada prinsipnya pariwisata mencakup multi aspek sebagai kebutuhan manusia, seperti aspek ekonomi, lingkungan, social, budaya, komunikasi, psikologi, maupun keamanan. Aspek-aspek tersebut membentuk lingkungan pariwisata.

Lingkungan pariwisata menurut Stephen Witt (1994: 30) bahwa “ the tourism environment is a model of a system which has both dynamic and static component”. Model tersebut menggambarkan bahwa para wisatawan potensial akan memutuskan memilih beberapa daerah tujuan wisata berdasarkan citra, persepsi, informasi yang tersedia, jasa transportasi dan komunikasi, kemampuan keuangan, serta sikap yang dimiliki oleh wisatawan potensial tersebut.

Tatanan lingkungan pariwisata dan industry bidang pariwisata, memberikan acuan kepada produk pariwisata yang mana terdiri dari berbagai produk yang dominan yang merupakan jasa (services). Smith dan Lumsdon (1997: 141) membahas 5 aspek produk wisata sebagai berikut:

- (a) Hak yang cenderung bersifat fisik (physical plant), hal-hal yang Nampak seperti lokasi, sumber-sumber yang berhubungan dengan alam, iklim dan infra struktur.
- (b) Jasa (services) adalah pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan oleh para pelanggan berhubungan dengan fasilitas yang dimiliki. Merupakan elemen teknik pelengkap sesuatu jasa supaya bias disampaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
- (c) Keramahtamahan (hospitality), cara jasa yang disampaikan bersifat tambahan (extra), yang merasa pengunjung merasa lebih baik (visitors feel good)
- (d) Kebebasan dalam pilihan (freedom of choice), kebebasan memilih dalam memesan pelayanan yang diinginkan, sehingga pengunjung menjadi lebih rileks dan lebih santai dan memungkinkan pengunjung bertindak secara spontan
- (e) Keterlibatan (involvement), menekankan pada aspek keterlibatan atau partisipasi .

Batasan pengertian di atas memberikan gambaran bahwa produk pariwisata seperti yang dikemukakan Gamal Suwanto (1997: 48) adalah serangkaian dari berbagai jasa yang saling terkait yaitu jasa yang dihasilkan berbagai perusahaan (segi ekonomis), jasa masyarakat (segi social/psikologis), dan jasa alam atau keseluruhan pelayanan yang diperoleh dan dirasakan atau dinikmati wisatawan semenjak ia meninggalkan tempat tinggalnya, sampai ke daerah tujuan wisata yang telah dipilihnya dan kembali ke rumah di mana ia semula berangkat.

Wisatawan

Gamal Suwanto (1997: 4) menyatakan bahwa Wisatawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu perjalanan wisata, jika lama tinggalnya sekurang-kurangnya 24 jam di daerah/ negara yang dikunjunginya.

Di Indonesia dikenal 2 jenis wisatawan yaitu Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman). Wisnus adalah penduduk Indonesia yang secara sukarela melakukan kegiatan bepergian meninggalkan lingkungan keseharian di wilayah geografis Indonesia dalam

jangka waktu kurang dari 6 bulan baik untuk tujuan senang-senang secara santai, bisnis, budaya, keagamaan, maupun lainnya kecuali untuk mendapatkan balas jasa bekerja di tempat yang dituju dan untuk bersekolah/ kuliah, sehingga dapat memperluas kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan Negara (Toto Sugito, 1996: 34). Sedangkan wisman menurut World Tourism Organization (WTO) yaitu mereka yang melakukan perjalanan dan berada di Negara lain selama 24 jam atau lebih (Holloway dalam Kartawan, 1999: 47).

Tamu mancanegara dikategorikan dalam 2 kelompok:

- (1) Wisatawan (Tourism) yaitu setiap pengunjung dari suatu Negara, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi yang tinggal sekurang-kurangnya 24 jam (minimal 1 tahun) tetapi tidak lebih dari 6 bulan di tempat yang dikunjungi
- (2) Pelancong (Excursionist), yaitu setiap pengunjung dari suatu Negara, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi yang tinggal kurang dari 24 jam di tempat yang dikunjungi, mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di Negara tersebut.

Pengembangan Pariwisata Paradigma Tinjauan Teoritis

Telah disebutkan, pariwisata merupakan aktivitas manusia di dalam perjalanan for looking something different, maka pariwisata tidak akan menarik bila tidak memiliki sesuatu yang khas. Perbedaan budaya dapat menjadi daya tarik yang memotivasi untuk melakukan perjalanan kunjungan ke suatu objek wisata. Sharplay (dalam Pitana dan gayatri, 2005) menyebutkan bahwa pada dasarnya seseorang melakukan perjalanan dimotivasi oleh motivasi budaya, yaitu keinginan untuk mengetahui kebudayaan, adat istiadat, tradisi atau peninggalan budaya.

Tugas pelaku pariwisata adalah bagaimana menyajikan sesuatu yang menarik bagi pengunjung, serta melayani mereka agar kebutuhannya selama dalam perjalanan terpenuhi. Sehingga para pelaku pariwisata harus dapat menempatkan diri bagaimana melayani wisata itu sendiri, tidak hanya sebatas pembangunan objek wisata atau hotel, tetapi kesinergian antara satu hal dengan hal lainnya sehingga menampilkan wisata yang utuh dan menarik (Priyono, 2012a).

Pengembangan pariwisata semestinya berwawasan budaya dan berbasis masyarakat dan sekaligus berwawasan lingkungan. Dimensi kultural menjadi demikian sentral dalam pengembangan pariwisata agar seni budaya tidak semata-mata dijadikan komoditas. Pemberdayaan kebudayaan

local sebagai kekuatan dalam pembangunan kepariwisataan merupakan strategi dalam pengelolaan kepariwisataan dewasa ini (Priyono, 2012a).

Dampak Pariwisata dalam Perekonomian

Pengembangan pariwisata yang berorientasi pada upaya mengejar pertumbuhan, dengan mengandalkan modal kaum kapitalis akan menempatkan pariwisata dalam konteks dan akan dihadapkan pada apa yang dinamakan dominasi yang terjadi dalam masyarakat. Dominasi dapat muncul dari beberapa sumber (1) dari kapitalis yang bersumber dari modal yang ditanamkan dengan tujuan untuk mengeruk sebanyak mungkin sumber daya alam dan potensi sumber daya budaya serta hanya berorientasi pada pasar, (2) sumber dominasi berasal dari Negara melalui kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Apabila kondisi ini tidak disadari sejak dini, bukan mustahil masyarakat tidak dapat turut mendapatkan kesejahteraan yang menjadi hak nya.

Johnson dan Moore (1993) memfokuskan bahwa pengukuran dampak ekonomi pariwisata akan lebih tepat dilakukan apabila berfokus pada aktivitas wisata tertentu yang sedang berkembang pesat berikut sumber daya pariwisata yang dipergunakan, serta dengan segala macam dampaknya.

2.3 Sektor Pariwisata Kabupaten Bandung

Untuk mengenal Kabupaten Bandung, di bawah ini disampaikan lambang Kabupaten Bandung, sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Lambang Kota Bandung

Kabupaten Bandung memiliki potensi wisata yang sangat besar, selain terkenal dengan keindahan alam nya, Kabupaten Bandung juga kenyamanan udaranya karena dikelilingi pegunungan, serta keramahan masyarakatnya. Selain itu Bandung sangat terkenal dengan wisata kulinernya, Kesenian

dan Budayanya, wisata belanja, Taman Hutan Raya, Gunung Tangkuban Perahu, daerah perkemahan yang sejuk dan tenang, wisata sejarah dan event tertentu, dan lain sebagainya.

Kabupaten Bandung juga memiliki 108 Situs Budaya yang telah diatur oleh Undang-undang No. 11/2010 tentang Aturan Pengklasifikasian Cagar Budaya (Disdikbud Pemkab Bandung: Harian PR: 11/1/14 Hal. 5) Selain itu, di Daerah ini terdapat juga : Air Terjun Sindulang, Kawah Putih, Hot Spring Water, Ranca Upas, Walini, Kawah Cibuni, Situ Patenggang, Sungai Cisangkuy, Cibolang Fot Spring Water, Pangalengan, Situ Cilenca. Kabupaten Bandung sangat kaya akan daerah wisata, yang dapat menggerakkan ekonomi rakyat dengan dampak yang besar, bukan saja untuk meningkatkan ekonomi daerah tetapi juga perekonomian nasional. Dalam hal ini, diharapkan kenaikan pendapatan pada sector pariwisata dapat menjadi sarana meningkatkan penghasilan masyarakat sehingga masyarakat dapat menaikkan taraf hidupnya.

Tabel 2. 1

Kecamatan-kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bandung

	KECAMATAN
1	Ciwidey
2	Rancabali
3	Pasir Jambu
4	Cimaung
5	Pangalengan
6	Kerta sari
7	Pacet Ibun
8	Paseh
9	Cahancang
10	Cicalengka
11	Nagreg
12	Rancaekek
13	Majalaya
14	Solokan jeruk
15	Ciparay
16	Baleendah
17	Arjasari
18	Banjaran
19	Cangkuang
20	Pamengpek
21	Katapang
22	Soreang
23	Kutawaringin
24	Margaasih
25	Margahayu
26	Dayeuh kolot
27	Bojongsoang
28	Cilenyi

29	Cilengkrang
30	Cimencyan
	J u m l a h: 30 Kecamatan

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung, 2011

Kabupaten Bandung memiliki daya tarik wisata luar biasa, sebagai perpanjangan daerah cakupan dari Kota Bandung. Kota Bandung sendiri setiap akhir pekan didatangi sekitar 80,000 mobil dari luar kota, yang berwisata untuk berlibur, berbelanja atau untuk berekreasi bersama keluarga. Saat ini sekitar 70% PAD Bandung berasal dari sektor pariwisata (Harian PR: 1/2/14 Hal. 22), sehingga Ketua Badan Wisata Kota Bandung, Nicolaus Lumanauw, telah memprogramkan untuk mempergencar pemasaran pariwisata Bandung kepada wisatawan domestik dan mancanegara, agar tujuan pemasaran sektor wisata semakin luas dapat dijangkau. Hal ini memiliki dampak yang positif terhadap Kabupaten Bandung, yaitu para wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung, dapat ditarik untuk berwisata juga ke Kabupaten Bandung.

2.4 Sektor Pariwisata Kabupaten Jember

Di bawah ini disampaikan terlebih dahulu lambing Kabupaten Jember sebagai berikut:



Gambar 2.2 Lambang Kabupaten Jember

Kabupaten Jember yang berada di Propinsi Jawa Timur merupakan daerah potensial di bidang Pariwisata. Kabupaten Jember merupakan salah satu kota terbesar ketiga di Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Probolinggo dan Bondowoso di utara, Kabupaten Banyuwangi di timur, Samudra Hindia di selatan dan Kabupaten Lumajang di barat, membuat Kabupaten Jember sebagai pusat regional di kawasan tapal kuda. Secara geografis, Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Samudera Indonesia disebelah Selatan mempunyai banyak obyek

wisata pantai yang indah. Begitu juga dengan pegunungan yang membentang di sebelah Utara dan Timur menjadikan Jember banyak memiliki obyek wisata alam seperti air terjun. Areal perkebunan yang ada juga merupakan lokasi wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi.

Pada zaman pemerintahan Belanda, Jember sudah dikategorikan sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, sehingga dulu jember dijadikan sebagai tempat berekreasi. Mengingat potensi Kabupaten Jember yang cukup potensial dibidang pariwisata kedepannya hal ini perlu adanya pengembangan dibidang kepariwisataan itu sendiri sehingga dengan adanya perbaikan dan pengembangan disektor kepariwisataan akan memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Jember.

Perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Jember meningkat selama 5 tahun ini yang terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan dari 260 ribu orang pertahun naik menjadi 550 ribu orang pertahun pada tahun 2010. Lima tahun lalu Kabupaten Jember berada di peringkat 27 dari 38 kota/kabupaten di Jawa Timur sebagai kota tujuan wisata (Sumber : KOMINFO JATIM 2012). Selain itu Kabupaten Jember didukung oleh sektor pendidikan dimana di Kabupaten Jember terdapat banyak perguruan tinggi, sehingga banyak penduduk dari wilayah lain khususnya penduduk dari karesidenan besuki ini tertarik untuk mendatangi wilayah ini, hal ini sangat menguntungkan bagi Kabupaten Jember untuk lebih mengenalkan potensi pariwisatanya. Dewasa ini Jember dikenal ke mancanegara dan disetarakan dengan Rio De Jenairo karena *event* pariwisata “Jember Fashion Carnaval”nya, yaitu Peragaan Busana 650 orang peserta di Jalan Raya Kota Jember sampai ke Alun-alun Jember.

Sekilas tentang Perkembangan Jember Fashion Carnaval (JFC)

Visi Jember Fashion Carnaval

“Menjadikan Jember sebagai Kota Wisata Mode Pertama di Indonesia bahkan di Dunia” (<http://jemberfashioncarnaval.com>).

Misi Jember Fashion Carnaval

Suatu proses atau perjalanan yang membawa banyak manfaat bagi pengembangan dunia pendidikan, SDM, Kesenian, Budaya, dan perkembangan Perekonomian.

Meningkatkan asset SDM (Sumber Daya Manusia) dan kekayaan Budaya Daerah yang bukan melalui penggalian peninggalan budaya lama, tetapi melalui Penciptaan sebuah maha karya baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya, sebab Kebudayaan itu sendiri berawal dari ketiadaan.

Menyelenggarakan event yang mempunyai Konsep yang jelas, SDM yang berkualitas, dan berkesinambungan, maka akan menjadi potensi unggulan yang nantinya dapat memberikan multiplier effect terhadap potensi lainnya. dan Fashion Carnaval dengan Tema Trend fashion Dunia tidak dimiliki oleh daerah lain, bahkan di duniapun belum ada yang mengangkat potensi seperti ini. (<http://jemberfashioncarnaval.com>).

Sejarah Munculnya Jember Fashion Carnaval

Sejak Tahun 1850, Jember termashur dengan Tembakau naogst nya. Tidak terduga kurang dari 2 Abad kemudian, Jember tidak hanya dikenal dengan harumnya cita rasa tembakau, tetapi mengejutkan dunia mode di Tanah Air dengan menghadirkan JFC, sebuah Festival fashion karya pribumi.

Berdirinya Rumah Mode Dynand fariz sebagai realisasi keinginannya sebagai seorang pendidik di bidang fashion, yang tidak hanya memiliki pengetahuan secara teori tetapi juga ingin terjun langsung sebagai praktisi mode yang memahami keadaan lapangan.

Dimulainya Kegiatan Pekan Mode Dynand Fariz, di mana seluruh karyawannya selama sepekan harus berpakaian sesuai trend fashion dunia. Dimulainya acara pekan mode tersebut dengan dilaksanakannya peragaan mode berkeliling kampung Kota Jember sampai Alun-alun kota Jember, telah menjadi inspirasi timbulnya gagasan menyelenggarakan JFC. 1 januari 2001 JFC pertama diselenggarakan bersamaan dengan HUT kota Jember. Agustus 2001 disebutkan bahwa JFC merupakan 'The Global Village' dianggap jember telah melalui masa krisis Identitas Budaya dan JFC sebagai penanda baru identitas kota Jember yaitu Identitas lokal-global (event.goindonesia.com/?event=jember.fashion.carnaval-2013).

JFC merupakan sebuah perayaan kebebasan ekspresi dalam busana: 'Sambut Unjuk Boleh kami!' menandakan tidak adanya batasan konsep busana yang menyekap kreativitas desainer. Para model berpenampilan bebassesuai tema yang sudah ditentukan. Tema-tema Barat seperti Busana Inggris, Brazil, atau belahan dunia lainnya. Pada Tahun 2012, tema JFC misalnya Rome Empire, Madurere, Persian, Oceanarium, Orchidacene, Mushroom, Savana, Dragon, Trinidad & Tobago, dan Planet hedity. JFC 2012 tersebut diikuti 600 peserta, dan dihadiri ratusan ribu penonton di mana diantaranya terdapat 960 Fotografer & Wartawan baik Nasional maupun Internasional (Tempo Media Group 2012/ Minggu 8 Juli 2012).

Sebagai kota kecil, Jember kini terangkat namanya berkat ide dan tekad yang berani dari seorang Dynand Fariz, yang telah menjadikan Jember sebagai kota Wisata dan Mode. Kini, Jember

dapat bersaing dan sejajar dengan Rio De Janeiro di Venezia yang lebih dahulu dikenal dunia sebagai penyelenggara Carnival Mode.

Secara lengkap Kabupaten Jember memiliki Jenis-jenis pariwisata sebagai berikut (Humas @ jemberkab.go.id):

Tabel 2.

JENIS – JENIS WISATA KABUPATEN JEMBER

No.	Jenis Pariwisata	Keterangan
1	Wisata Belanja	Suwar-suwir; Buah Naga; Cerutu Bobin; Tape dan Produk Olahan Singkong; Kedelai Edamame; Sangkar Burung; Jeruk Semboro; Kerajinan Manik-manik; Batik Sumberjambe; Durian Sumberjambe
2	Wisata Budaya	Makam Turba Condro; Pesangrahan Juk Zhedep dan Juk Zhina; Situs Duplang; Wahana Wisata Tugu Mastrip; Jember Fashion Carnival; Tarian Jaran Kencak; Tarian Lahbako; Candi Deres; Goa Jepang
3	Wisata Agro	Agro wisata Kopi & Cacao Agro wisata & Loko tour Garahan Agro wisata Gunung Gambir
4	Wisata Bahari	Alam Nusa Barong Tempat Pelelangan Ikan Puger Pantai Bande Alit; Pantai Puger Pantai Pasir Putih Malikan Pantai Watu Ulo
5	Wisata Buatan	Lapangan Golf Glantangan Pemandian Niagara Ambulu Pemandian Patemon Pemandian Oleng Sibutang Pemandian Kebon Agung Taman Botani Sukorambi

Sumber: Humas@jember.kab.go.id

Penelitian Sebelumnya tentang Topik Pendapatan Asli Daerah dan sektor Pariwisata.

Peneliti	Judul	Kesimpulan
Desi Ulandari, Siti Komariah, Regina Niken [2013]	“Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD dan Kebijakan Pengembangannya”	Temuan: Kontribusi Sektor Pariwisata berpengaruh secara signifikan terhadap PAD Kabupaten Jember walaupun angkanya masih relative kecil
Elizabeth T. M. [2013]	“Pengendalian Sistem Informasi Pendapatan Daerah Sektor Green Pariwisata untuk Memaksimalkan Pendapatan di Kota Bandung”	Temuan: Software SIMPATDA untuk mengelola Keuangan Kota Bandung telah memadai dalam memproses data sehingga dapat menghasilkan Laporan PAD yang lengkap, akurat dan reliabel

Emi Suwarni [2013]	“Peran Pariwisata terhadap Perekonomian dalam upaya mengurangi Kemiskinan “	Temuan: Pendapatan sector pariwisata, dan jumlah wisatawan mancanegara telah berpengaruh positif dan signifikan meningkatkan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan
GA Sri Oktaryani [2013]	“Peranan Sektor wisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Barat”	Temuan: PDRB Provinsi mengalami penurunan periode 2008 – 2011, namun pendapatan sector pariwisata tetap meningkat
Siswoyo Hari Santoso [2013]	“Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat berbasis Pariwisata dan Ekonomi Kerakyatan, melalui Bulan Berkunjung ke Jember “	Temuan: Pada Bulan tsb omzet penjualan (pedagang Bakso, Nasi, mainan anak, pakaian) telah naik sebesar 20% - 50%, sehingga menumbuhkan ekonomi kreatif sebagai terobosan baru menghadapi globalisasi.

Sumber: diolah oleh peneliti

Pada penelitian ini, terdapat hal yang berbeda dengan berbagai penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini ditekankan pada perbandingan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah baik di Kabupaten Bandung maupun di Kabupaten Jember. Masing-masing kabupaten memiliki karakteristik dan kekhasan nya sendiri-sendiri tentang pengembangan sektor pariwisatanya, oleh karena itu masing-masing kabupaten dapat saling belajar/mem-*benchmark* strategi perkembangan kepariwisataan di kabupaten lain untuk mengembangkan pariwisata di kabupatennya.

BAB III METODE PENELITIAN

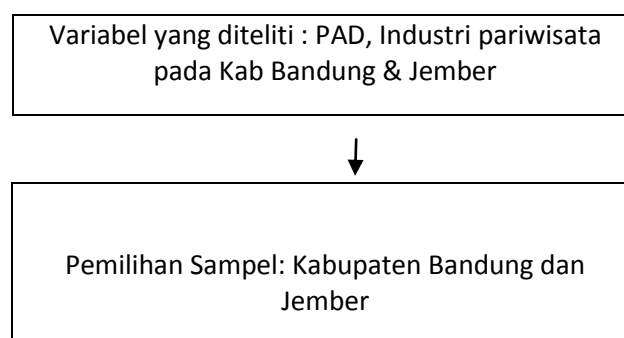
Jenis penelitian yang dilakukan termasuk jenis penelitian Deskriptif Kuantitatif yaitu jenis penelitian yang mampu menggambarkan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kebijakan pengembangannya baik di Kabupaten Bandung maupun di Kabupaten Jember.

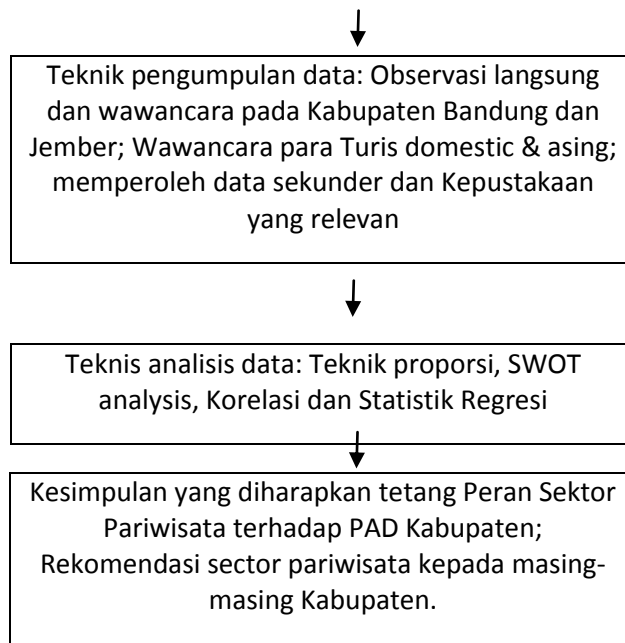
Penelitian ini menggunakan data yang sifatnya sekunder di mana data didapatkan dari instansi atau pihak yang mempunyai wewenang secara langsung. Data didapatkan dari Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung dan Jember Jember, Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Bandung dan Jember Jember dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung dan Jember. Selain itu, juga dilakukan studi pustaka serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan unit analisis yang diteliti yaitu sektor industri pariwisata dikabupaten Bandung dan Kabupaten Jember Jember yaitu menyangkut kesinambungan fasilitas wisata atau komponen wisata dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten baik Bandung maupun Kabupaten Jember.

Metodologi yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu metoda yang melakukan penguraian topik yang diteliti untuk mendapatkan pemahaman dengan analisis yang mendalam. Metode deskriptif analitis dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis serta menginterpretasi data, melukiskan suatu keadaan serta membuat kesimpulan. Adapun langkah-langkah penelitian sebagai berikut ini. Serta digunakan pula metode studi kepustakaan yaitu berupa data sekunder dalam runtut waktu yang bersifat kuantitatif yang diperoleh dari instansi atau pihak yang mempunyai wewenang secara langsung.

Langkah-langkah penelitian dapat dilihat pada skema berikut ini.





Skema 3.1 Uraian langkah-langkah Penelitian

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis proporsi dan analisis swot, Analisis Regresi dan Korelasi. Analisis proporsi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi atau kemampuan dari sektor pariwisata terhadap PAD, analisis SWOT digunakan untuk menganalisis perencanaan strategis untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu sektor pariwisata. Sedangkan Analisis Regresi digunakan untuk menganalisis besarnya pengaruh pendapatan dari sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten, sedangkan Korelasi digunakan untuk memahami hubungan pendapatan sektor pariwisata dengan pendapatan keseluruhan asli daerah.

1 Analisis proporsi

dengan rumus (Djarwanto, 2001:152) :

$$Z = \frac{X_m}{Y_m} 100\%$$

Dimana :

Z = Proporsi penerimaan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah

X_m = Penerimaan Sektor Pariwisata

Y_m = Pendapatan Asli Daerah

2 Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan untuk mencari rencana strategis dengan menggunakan kerangka kerja faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman.

Tabel 3.1 Matrik analisis Tabel SWOT

S – W	STRENGTH (S) : Identifikasi kekuatan – kekuatan	WEAKNESS (W) : Identifikasi kelemahan- kelemahan
O – T		
OPPORTUNITY (O) : Identifikasi kesempatan atau Peluang	SO Strategi : Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	WO Strategi : Mengatasi kelemahan dengan mengambil kesempatan
TREAT (T) : Identifikasi ancaman-ancaman	ST Strategi : Menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman-ancaman	WT Strategi : Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Keterangan :

- strategi SO dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan dan seluruh peluang;
- strategi ST menggunakan kekuatan yang dimiliki sektor potensial untuk mengatasi ancaman;
- strategi WO diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada;
- strategi WT didasarkan pada kegiatan yang bersifat deferensiv dan berusaha untuk meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

3 Analisis Regresi dan Korelasi

3.1 Regresi

Regresi digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel yang lain. Analisis regresi adalah analisis yang mempelajari bagaimana dua atau lebih variabel saling berhubungan. Penelitian ini menggunakan Regresi linier untuk mendapatkan persamaan yang diharapkan dapat digunakan untuk memprediksi harga saham.

Persamaan regresi sederhana adalah :

$$y = a + bx$$

y = harga saham

x = rasio profitabilitas

b = besarnya perubahan rata-rata variabel y (harga saham) jika rasio profit (x) berubah satu satuan.

Dengan demikian a dan b merupakan konstanta. Koefisien a dan b dicari dengan *least square method* menggunakan sistem persamaan normal sebagai berikut :

$$b = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

$$a = \bar{y} - bx$$

3.2 Korelasi

Korelasi adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan kuatnya hubungan antara dua variabel. Nilai korelasi berkisar antara dua kelompok atau lebih data. Nilai korelasi berkisar antara -1 sampai dengan +1. Koefisien korelasi bukan merupakan hubungan sebab akibat tetapi hanya menunjukkan kuatnya hubungan antar variabel. Richard J.Tersine memberikan penilaian sederhana terhadap koefisien korelasi sebagai berikut :

Absolute value of correlation coefficient	Interpretation
0.9 – 1.00	very high correlation
0.7 – 0.89	high
0.4 – 0.69	moderate
0.2 – 0.39	low
0.0 – 0.19	very low

Rumus korelasi :

$$r = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan :

r = Koefesien korelasi antara x dan y

n = banyaknya pasangan variabel s dan y

x = rasio profitabilitas

y = harga saham pada periode tertentu

Nilai koefesien korelasi berkisar antara $-1 \leq r \leq 1$

BAB IV JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

Kegiatan	Bulan (Tahun 2014)										
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov
Persiapan & penyusunan Proposal	■	■									
Beberapa kali mengunjungi Biro Pusat Statistik dan Dispenda (Kabupaten Bandung dan Jember)			■								
Beberapa kali mengunjungi Kantor Dinas Pariwisata				■							
Wawancara Wisatawan Bdg & Jember			■	■							
Pengolahan Data Bandung dan Jember					■						
Analisis Hasil Pengolahan Data Bandung dan Jember						■	■				
Persiapan Laporan dan Rangkuman Simposium Nas Akt 2015								■			
Presentasi Sem Nas									■		
Penyusunan Lap Hsl Penelitian stlh input Sem Nas										■	
Penyerahan Laporan ke LPPM											■
											■

Sumber: Disusun oleh Peneliti

Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten bandung 2012 semakin membaik disbanding Tahun 2011. Berdasarkan perhitungan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstat 2000, laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Bandung 2012 mencapai 6,15% yang menunjukkan peningkatan dari Tahun 2011 sebesar 5,94%. Jumlah penduduk kabupaten Bandung Tahun 2012 adalah 3.351.048 jiwa dengan komposisi Laki-laki 1.703.535 jiwa dan perempuan sebesar 1.647.513 jiwa (www.bandungkab.go.id, diunduh 9/6/2014 pkl. 11.02). untuk melengkapi uraian keadaan penduduk Kota bandung tersebut, di bawah ini disampaikan tabel yang menunjukkan kondisi Pendidikan masyarakat Kabupaten Bandung berdasarkan data Biro Pusat Statistik pada periode tahun 2009 dan 2010.

Tabel 5.1

**Penduduk usia 10 Tahun ke atas berdasarkan
Jenjang Pendidikan yang ditamatkan (Ijazah Tertinggi yang dimiliki)
di Kabupaten Bandung Tahun 2009-2010**

No.	Jenjang Pendidikan	2009				2010			
		Jenis Kelamin		Jumlah	%	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan			Laki-laki	Perempuan		
1.	Tdk/blm punya Ijazah	182.036	213.487	395.523	15,17	127.124	132.578	259.702	10,25
2.	SD / setara SD	442.875	482.231	925.106	35,48	484.222	515.443	999.665	39,47
3.	SLTP / setara SLTP	325.026	329.141	654.167	25,09	295.192	294.330	589.522	23,28
4.	SLTA / setara SLTA	297.655	222.798	520.453	19,96	306.693	239.027	545.720	21,55
5.	Perguruan tinggi	61.427	50.570	111.997	4,30	74.670	63.247	137.917	5,45
Jumlah		1.309.019	1.298.227	2.607.246	100,00	1.287.901	1.244.625	2.532.526	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Suseda 2009, 2010.

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk kabupaten Bandung usia 10 Tahun ke atas atau usia sekolah yang telah menyelesaikan pendidikan telah meningkat sebanyak 5,45% (2010) tamatan Perguruan Tinggi, dan 21,55% tamatan SLTA. Sedangkan tamatan SLTP telah turun dari 25,09% (2009) menjadi 23,28% (2010).

Berikutnya, di bawah ini ditunjukkan data jumlah objek wisata kabupaten Bandung, didasarkan lembaga pengelola pada periode tahun 2012, yaitu Perhutani, PTPN, BKSDA, Pemerintah Kabupaten /Desa.

Tabel 5.2**Data Jumlah Objek Wisata Kabupaten Bandung berdasarkan Lembaga Pengelola**

	KECAMATAN	Perhutani	PTPN	BKSDA	PemKab / Desa	Jumlah
1	Ciwidey					
2	Rancabali	3	1	1	4	9
3	Pasir Jambu				1	1
4	Cimaung					
5	Pangalengan	1	1	-	2	4
6	Kerta sari					
7	Pacet Ibun					
8	Paseh					
9	Cahancung					
10	Cicalengka					
11	Nagreg	1			1	2
12	Rancaekek					
13	Majalaya					
14	Solokan jeruk					
15	Ciparay					
16	Baleendah					
17	Arjasari				1	1
18	Banjaran					
19	Cangkuang					
20	Pamengpek					
21	Katapang					
22	Soreang					
23	Kutawaringin					
24	Margaasih					
25	Margahayu					
26	Dayeuh kolot					
27	Bojongsoang					
28	Cilenyi				1	1
29	Cilengkrang					
30	Cimendan				1	1
	J u m l a h:					19

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung 2012

Sedangkan data Jumlah Tempat Wisata di kabupaten Bandung 2012 menurut informasi pada info.pikiran.rakyat.com/drh/kab.bdg. dengan tanpa memperhatikan lembaga pengelolanya berjumlah 180 tempat wisata, yang ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 5.3**Data Jumlah Tempat wisata di kabupaten Bandung 2012**

(Tanpa memperhatikan lembaga pengelola)

	JENIS WISATA	Jumlah	Keterangan
1	Agro wisata	8	
2	Benda Cagar Budaya	35	
3	Candi	1	
4	Curug	19	
5	Danau	5	
6	Galeri	9	
7	Goa	6	
8	Gunung	4	
9	Taman Nasional	8	
10	Kebon Binatang	1	
11	Outbond	14	
12	Monumen	6	
13	Musium	9	
14	Pantai	10	
15	Pemancingan	1	
16	Pemandian Air Panas	6	
17	Peneropong Bintang	1	
18	Perkemahan	7	
19	Gedung Pertunjukan	5	
20	Rohani	2	
21	Situs	6	
22	Sungai	4	
23	Taman Hiburan	6	
24	Waduk	4	
25	Penangkaran Hewan	1	
26	Cagar Alam	1	
27	Waterboom	1	
	J u m l a h:	180	

Sumber: info.pikiran.rakyat.com/drh/kabbdg. Diunduh 10/6/2014. Pkl 12.40.

Salah satu contoh tempat wisata Kabupaten Bandung, diantaranya adalah:



Gambar 5.2 Situ Ciburuy

Dinas pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bandung telah mempublikasikan data 2011 tentang Jumlah Wisman dan Wisnus yang berkunjung ke Kabupaten Bandung. Table 4.4 menunjukkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke kabupaten Bandung sebesar 26,75% dari Tahun 2008, dan naik kembali 11,2% pada Tahun 2010 dibandingkan Tahun 2009. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke kabupaten Bandung telah menunjukkan bahwa tempat wisata di kabupaten Bandung semakin menarik.

Tabel 5.4
**Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2008 - 2010**

No.	Uraian	2008	2009	2010
1.	Jumlah obyek wisata (obyek)	49	49	53
2.	Jumlah kunjungan wisata (orang)	4.306.602	5.458.218	6.069.539
3.	Rata-rata kunjungan per obyek wisata (orang)	87.890	111.392	123.869

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2011.

Contoh wisata Kabupaten Bandung, diantaranya adalah seperti berikut ini.



Gambar 5.3 Kuliner Khas Kabupaten Bandung: Nasi Bambu



Gambar 5.4 Wisata Petik Strawberry - Lembang

5.1.2 Kabupaten Jember

Pengembangan Pariwisata Jember



Sumber: www.wisatakabupatenjember.peta_wisata_jember.gif

Gambar 4.5 Peta Wisata Kabupaten Jember

Pengembangan pariwisata Kabupaten Jember dicanangkan dalam kegiatan ‘Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ)’ yang dimulai pada tahun 2006 pada setiap bulan Juli di masa liburan anak-anak sekolah. Konsep BBJ adalah memadukan berbagai ragam kegiatan yang sudah ada maupun yang baru. Salah satu wisata yang sekarang ini menarik perhatian dunia adalah Jember Fashion Carnival. Di bawah ini diberikan contoh salah satu foto kegiatan tersebut.



Sumber: www.wisatakabupatenjember.peta_wisata_jember.gif

Gambar 5.6 Wisata Jember Fashion Carnival

Tabel 5.5

Jenis-jenis Kegiatan Bulan Berkunjung Jember

	Kegiatan	Contoh kegiatan
1	Lomba permainan rakyat tradisional	Egrang; Kasti
2	Lomba olah raga	Sepak bola; bola voley, pencak silat, motor cross, gerak jalan dll
3	Seni & Budaya	Seni tari, seni Suara
4	Jember Fashion Carnival	
5	Jember City Caranaval	
6	Marching band	
7	Gerak Jalan Tanggul Jember Tradisional	

Sumber: Dirjen Kepariwisataaan Jember

BBJ mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat Jember, meskipun pada awalnya belum banyak mendapatkan apresiasi masyarakat. Dampak langsung kegiatan ini adalah telah meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya sektor informal yang semakin berkembang, dengan terdorongnya munculnya kegiatan-kegiatan kreatif serta meningkatnya aktivitas perdagangan dalam masyarakat misalnya usaha makanan, minuman, mainan anak dan pakaian.

5.2 Konfigurasi Pendapatan Asli Daerah

Pembahasan bagian ini, adalah untuk menjawab identifikasi masalah yang pertama pada Bab satu yaitu untuk mengetahui bagaimanakah perbandingan konfigurasi Pendapatan industri pariwisata di Kabupaten Bandung dan Jember, berikut di bawah ini uraiannya.

Pada PAD Kabupaten Bandung, mulai Tahun 2000, jumlah PAD kabupaten Bandung masih sekitar Rp 50 milyar, disusul terjadinya kenaikan yang signifikan tahun 2004 yaitu naik 100%, serta naik lagi tahun 2011 sebesar 100% pula, dan pada tahun 2014 diharapkan PAD mencapai 0,5 Triliun Rupiah seperti yang dianggarkan pada penerimaan anggaran PAD sebesar Rp 512.623 (dalam Juta Rupiah) yaitu meningkat 10 kali lipat dibandingkan tahun 2000.

Tabel 5. 6**PAD DAN PENDAPATAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN BANDUNG****(Dalam Juta Rupiah)**

	P A D	Sektor pariwisata	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan
2000	50.367	500	-	-	-
2001	78.717	599	-	-	-
2002	82.546	948	-	-	-
2003	99.761	2.194	646	1.500	982,75
2004	109.582	2.489	907	1.839	1.184,91
2005	108.322	2.838	1.263	2.381	1.120,98
2006	137.533	3.994	1.630	2.935	1.321,31
2007	147.631	-	-	-	-
2008	144.660	-	343	1.754	1.063,88
2009	153.272	-	500	1.500	3.500
2010	198.651	-	600	3.850	4.800
2011	291.062	-	1.000	4.000	600
2012	366.317	12.228	1.400	4.250	900
2013	368.109	3.344	1.913	5.502	145
2014	512.623	-	-	-	-

Sumber: <http://www.bandungkab.go.id/arsip/2014/apbd>**Tabel 5. 7****Pendapatan Asli Daerah Periode Tahun 2000 - 2014****Kabupaten Bandung (dalam Juta Rupiah)**

Tahun	PAD Bandung
2000	50,367
2001	78,717
2002	82,546
2003	99,761
2004	109,582
2005	108,322
2006	137,533
2007	147,631
2008	144,660
2009	153,272
2010	198,651
2011	291,062
2012	366,317
2013	368,109
2014	512,623

Sumber: <http://www.bandungkab.go.id/arsip/2014/apbd>

Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung periode Tahun 2000 – 2014, diperoleh konfigurasi sebagai berikut:



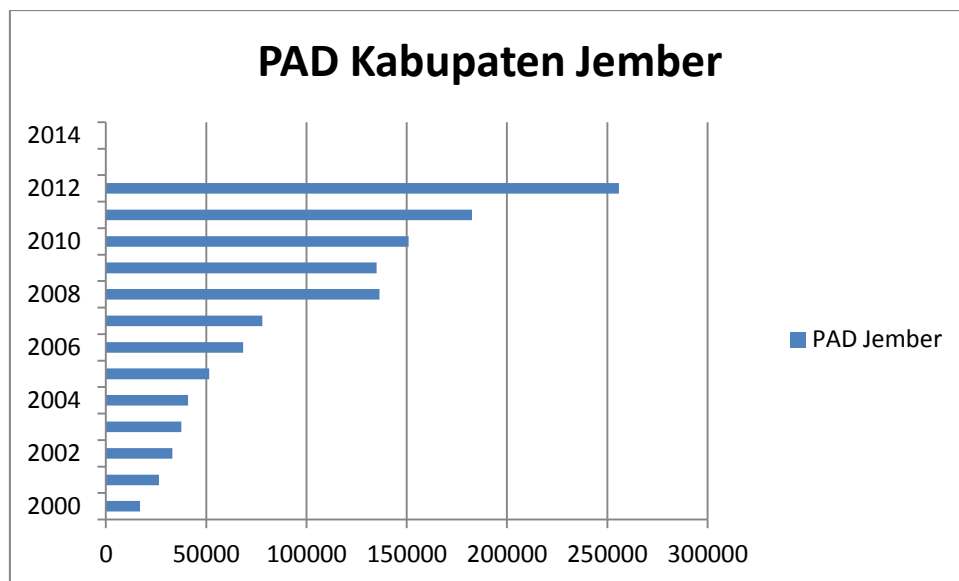
Gambar 5.7 Konfigurasi PAD periode 2000 – 2014

Sedangkan data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8
Pendapatan Asli Daerah Periode Tahun 2000 - 2014
Kabupaten Jember
(Dalam Juta Rupiah)

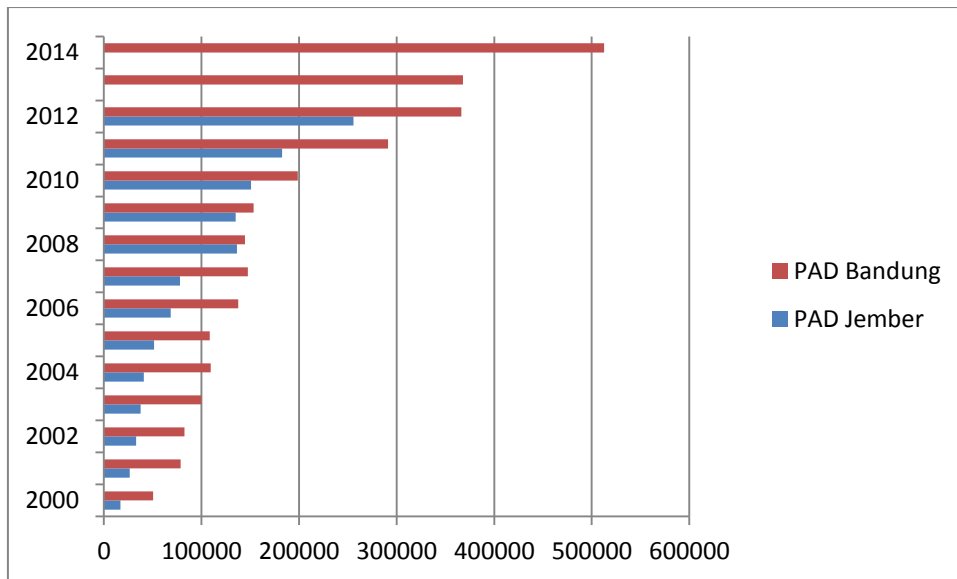
Tahun	PAD Jember
2000	16,984
2001	26,438
2002	33,105
2003	37,592
2004	40,910
2005	51,473
2006	68,448
2007	78,000
2008	136,471
2009	135,022
2010	150,936
2011	182,494
2012	255,805
2013	-
2014	-

Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah periode Tahun 2000 – 2014, diperoleh konfigurasi menggunakan grafik batang sebagai berikut:



Gambar 5.8 Konfigurasi PAD periode 2000 – 2014

Sedangkan diagram batang penggabungan PAD Kabupaten Bandung dan Jember, Nampak seperti gambae berikut ini:



Gambar 5.9 Diagram PAD Kabupaten Bandung dan Jember Periode Tahun 2000 - 2014

Sedangkan data Pendapatan Industri Pariwisata Kabupaten Bandung periode 2000 – 2014, adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 9

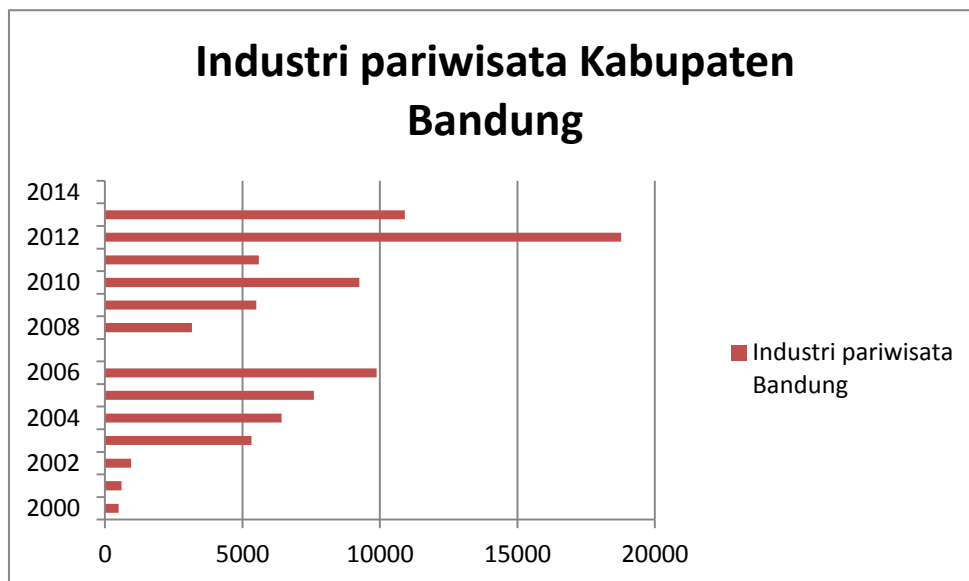
Realisasi PAD Kabupaten Bandung dari Industri Pariwisata 2000 – 2014

(Dalam Juta Rupiah)

Tahun	Industri Pariwisata Bandung
2000	500
2001	599
2002	948
2003	5,323
2004	6,420
2005	7,603
2006	9,880
2007	-
2008	3,161
2009	5,500
2010	9,250
2011	5,600
2012	18,778
2013	10,904
2014	-

Sumber: <http://www.bandungkab.go.id/arsip/2014/apbd>

Diagram Batang Pendapatan Industri Pariwisata Kabupaten Bandung Periode 2000 – 2014 adalah sebagai berikut:



Gambar 5.10 Grafik PAD Industri Pariwisata Kabupaten Bandung Periode 2000 - 2014

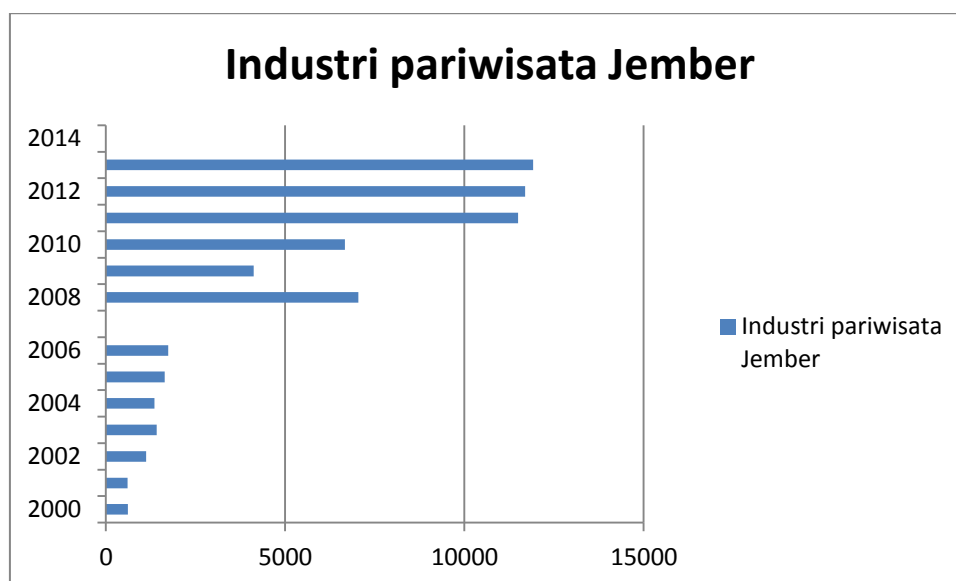
Sedangkan data Realisasi PAD Kabupaten Jember dari Industri Pariwisata Periode 2000 – 2014, adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 10
Realisasi PAD Kabupaten Jember dari Industri Pariwisata 2000 – 2014
(Dalam Juta Rupiah)

Tahun	Industri Pariwisata Jember
2000	610
2001	607
2002	1,123
2003	1,416
2004	1,351
2005	1,638
2006	1,740
2007	-
2008	7,040
2009	4,119
2010	6,665
2011	11,498
2012	11,694
2013	11,912
2014	-

Sumber: <http://www.jemberkab.go.id/arsip/2014/apbd>

Sedangkan Diagram Batang Pendapatan Industri Pariwisata Kabupaten Jember, adalah sebagai berikut:



Gambar 5.11 Grafik Industri Pariwisata Kabupaten Jember

Sedangkan data menyeluruh atas PAD Kabupaten Jember, serta Pendapatan Industri pariwisatanya dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan pendapatan sektor Pariwisata dan budaya, Nampak sebagai berikut:

Tabel 5.11**PAD DAN PENDAPATAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN JEMBER**

	PAD	Sektor Pariwisata	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak hiburan
2000	16.984	610	-	-	-
2001	26.438	607	-	-	-
2002	33.105	1.123	-	-	-
2003	37.592	1.416	-	-	-
2004	40.910	1.351	-	-	-
2005	51.473	1.638	-	-	-
2006	68.448	1.740	-	-	-
2007	78.000	-	-	-	-
2008	136.471	-	240	4.750	2.050
2009	135.022	4.119	-	-	-
2010	150.936	2.834	1100	1.946	785
2011	182.494	3.290	1100	2.658	4.450
2012	255.805	2.394	1300	3.500	4.500
2013	-	2.712	1400	4.000	3.800
2014	-	-	-	-	-

Sumber: <http://www.Jemberkab.go.id/arsip/2014/apbd>

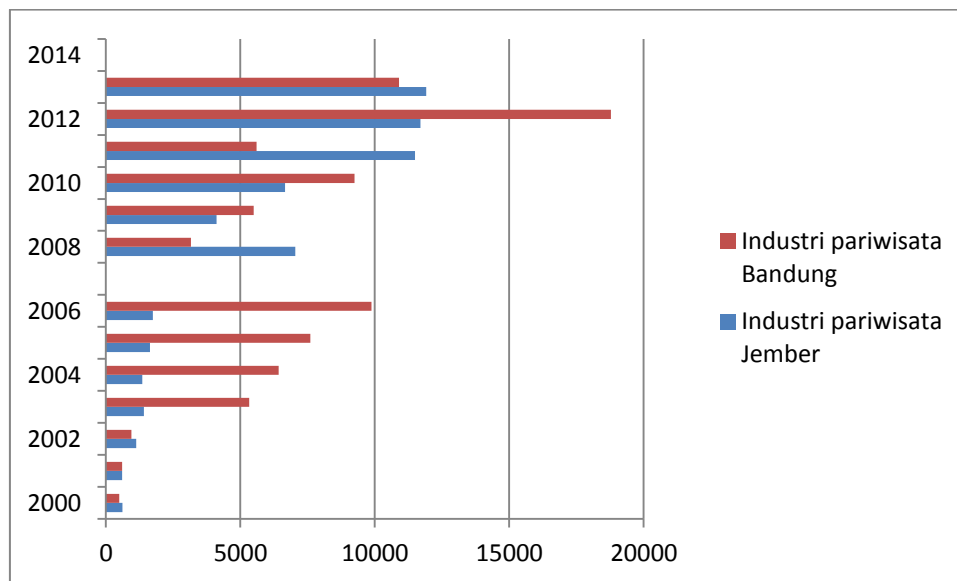
Melonjaknya Peningkatan PAD Kabupaten Jember, salah satunya dari peningkatan wisatawan yang membludak menghadiri Jember Fashion Carnaval (JFC). JFC 2014 merupakan JFC yang ke 13 kalinya yang diadakan secara konsisten di kabupaten Jember, diadakan pada Tanggal 20 – 24 Agustus 2014. Karnaval ini merupakan karnaval terbesar di Indonesia dan telah membuat kota Jember dan kota sekitarnya di Jawa Timur dikunjungi ribuan wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Karnaval diawali dengan pembukaan Jember International Exhibition, lalu dilanjutkan dengan Kids Carnaval, kemudian Artwear Carnaval, lalu Wonderful Artchipelago dari 7 provinsi, dan diakhiri dengan Grand Carnaval yang melibatkan 750 performer.

Pada Grand carnival penyelenggara menampilkan kostum dengan tema 'Triangle, Dynamic in harmony' yang berarti perbedaan adalah esensi kehidupan. Yang dimaksudkan adalah Berbeda memberikan kesempatan manusia berpikir tanpa batas, menjadikan dunia berwarna-warni, dan menjadi anugerah terbesar dari yang Maha Kuasa. Seluruh kabupaten Jember selama sepekan dibanjiri oleh wisatawan yang sangat padat. Hotel dan penganapan sangat penuh bahkan sampai ke luar kabupaten, sementara ada wisatawan yang telah memesan Hotel dari 1 Tahun sebelumnya. Kabupaten Jember kini, menjadi Kabupaten wisata yang ramai, menurut data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember (Kompas: 25/8/14. H. 24), hal ini telah mengakibatkan melonjaknya pendapatan kabupaten dari pajak hotel, restoran, dan retribusi wisata dari Rp 2,5 Milyar (2008)

menjadi Rp 8,5 Milyar (Tahun 2013), sehingga dikatakan bahwa Karnaval bisa menjadi salah satu daya untuk mendorong pariwisata dan perekonomian warga.

Di bawah ini ditunjukkan Diagram Batang mengenai perbandingan PAD dari industri pariwisata baik di Kabupaten Bandung maupun di Kabupaten Jember, namapak seperti gambar di bawah ini:

Grafik Perbandingan PAD Industri Par Kab Bdg dan Jember periode



Gambar 5.12 Diagram batang perbandingan Pendapatan Industri Pariwisata Kabupaten Bandung dan Jember.

5.3 Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPATDA) (Manurung; 2013: 176)

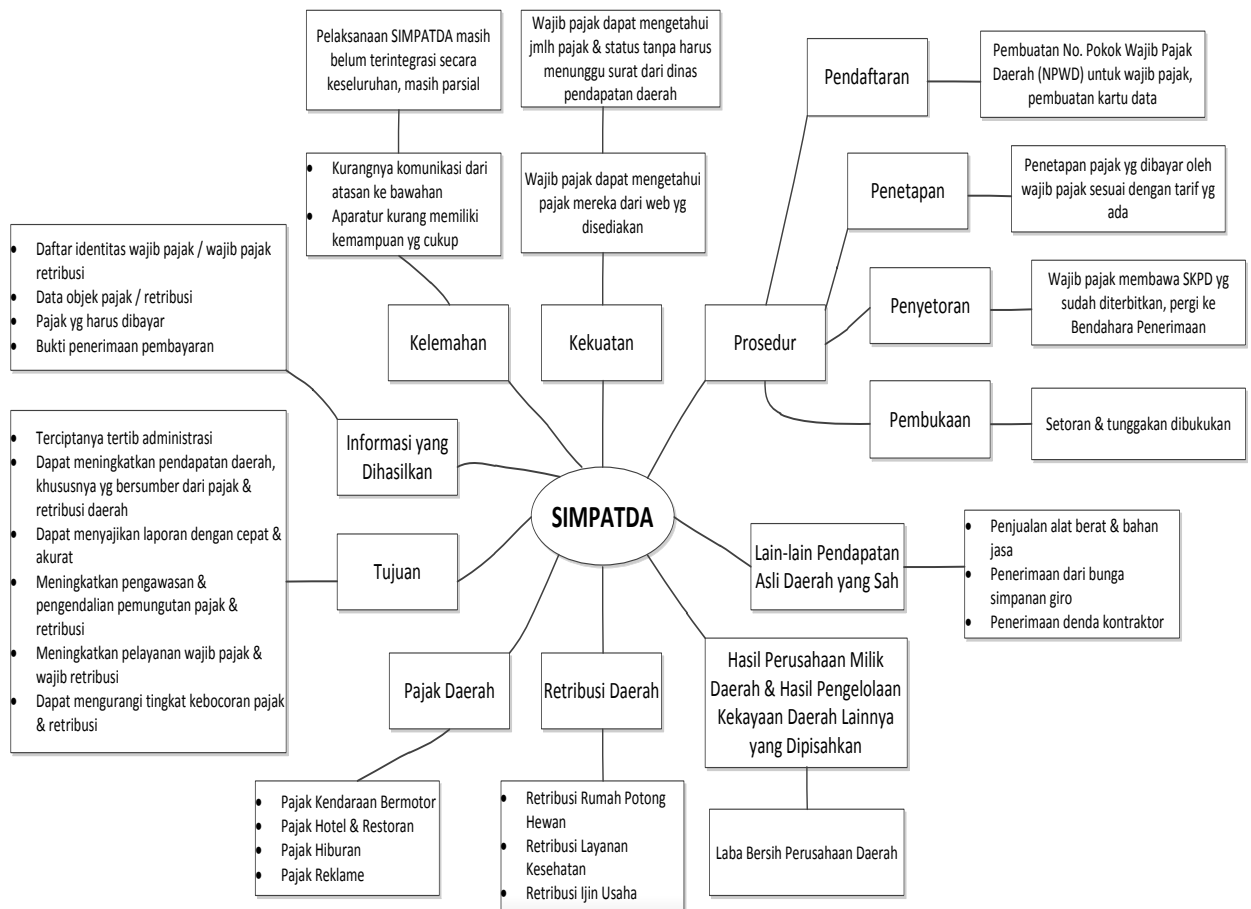
Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPATDA) adalah sebuah sistem yang berfungsi membantu proses pengelolaan pendapatan daerah. SIMPATDA umumnya menggunakan software guna menunjang kinerja dalam hal pendapatan dan retribusi daerah sehingga dapat tertata rapi sejauh mana PAD dapat dicapai. SIMPATDA melingkupi: (1) Pendataan Objek Pajak; (2) Memproses penghitungan pajak; (3) perhitungan jumlah pajak terpisah atau menyeluruh; (4) pelaporan perpajakan.

Tujuan SIMPATDA pada Dispenda Kota Bandung, untuk meningkatkan menyampaikan informasi kebijakan, mempermudah menyelesaikan pengelolaan. Aparatur Dispenda menyampaikan informasi tentang perpajakan secara langsung juga melalui jaringan berbasis data-based, informasi tersebut diantaranya: (1) Pendaftaran wajib pajak/retribusi daerah; (2) pengolahan

data perpajakan; (3) menghitung potensi pajak/retribusi; (4) proses pembukuan dan pelaporan wajib pajak; (5) informasi jenis persyaratan.

PAD diharapkan dapat ditingkatkan melalui pengembangan SIMPATDA. Dispenda berupaya mengembangkan Software SIMPATDA berbasis web, untuk mengembangkan berbagai menu pelaporan, dan memberikan informasi yang lebih transparan kepada para wajib pajak. Saat ini SIMPATDA Kota Bandung masih menggunakan aplikasi desktop dan sesuai peraturan, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengaksesnya. Hal ini dapat menghasilkan pengendalian yang lebih baik khususnya pada pelaporan yang relevan dan *reliable*, sehingga transparansi pelaporan kepada *stakeholders'* semakin baik dan pengambilan keputusan *users* dapat semakin tepat karena wajib pajak dapat mengetahui pajak mereka dari informasi Dispenda. Pengendalian lain adalah lebih banyaknya admin yang dapat mengakses dan memproses data, juga dapat dihindarkan akses data oleh sembarang pegawai. Pengendalian yang muncul dari sistem berbasis web ini adalah juga kemudahan atas akses sistem baik oleh Dispenda maupun oleh wajib pajak.

Proses Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah bila dinyatakan dalam skema, nampak sebagai berikut:



Sumber: Manurung; 2013: 176

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandung menggunakan Software SIMPATDA, yang memenuhi prinsip keadilan, proporsional, demokratis, transparan, bertanggung jawab. Tujuan penggunaan PAD untuk pendidikan masyarakat, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan suprastruktur, untuk melindungi, melayani, dan memberi fasilitas yang lebih baik. Pengendalian yang baik khususnya dihasilkannya pelaporan yang relevan dan reliabel, sehingga transparansi pelaporan kepada stakeholders' semakin baik dan pengambilan keputusan users dapat semakin tepat karena wajib pajak dapat mengetahui pajak mereka dari informasi Dispenda. Pengendalian lain yang dihasilkan adalah lebih banyaknya admin yang dapat mengakses dan memproses data, selain juga karena akses dibatasi maka dapat dihindarkan akses data oleh sembarang pegawai. Sistem berbasis web ini memudahkan atas akses sistem baik oleh Dispenda maupun oleh wajib pajak. Pengendalian ini menghasilkan lengkapnya pendapatan yang diterima dan dicatat khususnya dari daerah wisata.

5.4 Signifikansi Kontribusi Industri Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten Bandung dan Jember

Kontribusi pendapatan industri pariwisata dalam PAD baik di Kabupaten Bandung maupun di Kabupaten Jember, dihitung berdasarkan Statistik SPSS versi 11 untuk menganalisis hubungan antara Pendapatan Industri Pariwisata dengan Pendapatan Asli Daerah, maka digunakan Model statistic Korelasi yaitu Model Pearson Correlation: dengan variabel Pendapatan industri pariwisata dan variabel Pendapatan Asli Daerah.

Hasil Pengolahan data berdasarkan Korelasi Pearson – Kabupaten Bandung, untuk menganalisis Hubungan antara variable Pendapatan dari Industri Pariwisata dengan variable Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung. Korelasi Pearson dihitung secara statistic menggunakan Software SPSS. Sedangkan pengolahan data berdasarkan Regresi ditujukan untuk menghitung pengaruh Pendapatan dari Industri Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil perhitungan Regresi dan Pearson Correlation disampaikan di bawah ini.

Tabel 5.12

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PADBdg	168376.85	107194.176	13
IndstriPariwisata	6497.38	5052.599	13

Tabel 5.13

Correlations

		PADBdg	IndstriPariwisata
Pearson Correlation	PADBdg	1.000	.770
	IndstriPariwisata	.770	1.000
Sig. (1-tailed)	PADBdg	.	.001
	IndstriPariwisata	.001	.
N	PADBdg	13	13
	IndstriPariwisata	13	13

Standar deviasi yang dihasilkan oleh variable PAD Kabupaten Bandung sebesar 107194.176 , sedangkan untuk variabel Industri Pariwisata sebesar 5052.599. hal ini berarti sebaran variasi variabel PAD lebih luas dibandingkan sebaran variasi Pendapatan Industri Pariwisata, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa risiko yang terdapat dalam variabel PAD juga lebih besar dibandingkan risiko atas Pendapatan Industri Pariwisata.

Tabel 5.14

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	IndstriPariwisat a ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PADBDg

Tabel 5.15
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.770 ^a	.593	.556	71410.034

a. Predictors: (Constant), IndstriPariwisata

b. Dependent Variable: PADBDg

Tabel 5.16
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.179E10	1	8.179E10	16.040	.002 ^a
	Residual	5.609E10	11	5.099E9		
	Total	1.379E11	12			

a. Predictors: (Constant), IndstriPariwisata

b. Dependent Variable: PADBDg

Tabel 5.17
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
		1	(Constant)	62208.941		
	IndstriPariwisata	16.340	4.080	.770	4.005	.002

a. Dependent Variable: PADBDg

Tabel 5.18
Casewise Diagnostics^b

Case Number	tahun	Std. Residual	PADBDg	Predicted Value	Residual	Status
1	2000	-.280	50367	70378.99	-20011.990	
2	2001	.094	78717	71996.66	6720.340	
3	2002	.068	82546	77699.35	4846.645	
4	2003	-.692	99761	149187.29	-49426.286	
5	2004	-.806	109582	167112.37	-57530.374	
6	2005	-1.094	108322	186442.71	-78120.711	

7	2006	-1.206	137533	223649.11	-86116.115	
8	2007	.	147631	.	.	M ^a
9	2008	.431	144660	113859.99	30800.007	
10	2009	.017	153272	152079.48	1192.517	
11	2010	-.206	198651	213354.85	-14703.853	
12	2011	1.923	291062	153713.49	137348.507	
13	2012	-.038	366317	369043.31	-2726.312	
14	2013	1.789	368109	240381.38	127727.624	
15	2014	.	512623	.	.	M ^a

a. Missing Case

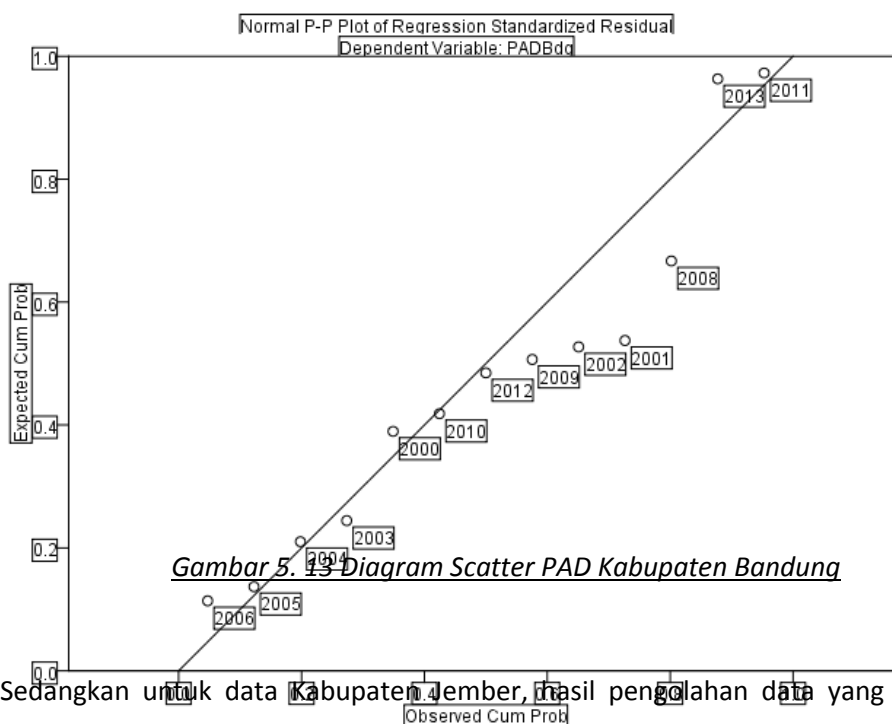
b. Dependent Variable: PADBDg

Tabel 5.19
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	70378.99	369043.31	168376.85	82559.965	13
Residual	-86116.117	137348.500	.000	68369.902	13
Std. Predicted Value	-1.187	2.431	.000	1.000	13
Std. Residual	-1.206	1.923	.000	.957	13

a. Dependent Variable: PADBDg

Diagram Scatter PAD Kabupaten Bandung:



Gambar 5.13 Diagram Scatter PAD Kabupaten Bandung

Sedangkan untuk data Kabupaten Jember, hasil pengolahan data yang juga berdasarkan Korelasi Pearson – Kabupaten Jember, untuk menganalisis Hubungan antara variable Pendapatan

dari Industri Pariwisata dengan variabel Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jember. Korelasi Pearson dihitung secara statistic menggunakan Software SPSS. Sedangkan pengolahan data berdasarkan Regresi ditujukan untuk menghitung pengaruh Pendapatan dari Industri Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil perhitungan Regresi dan Pearson Correlation disampaikan di bawah ini.

Tabel 5.20
Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PADJember	94641.50	75920.912	12
IndstriPariwisata	4125.08	4125.866	12

Tabel 5.21
Correlations

		PADJember	IndstriPariwisat a
Pearson Correlation	PADJember	1.000	.959
	IndstriPariwisata	.959	1.000
Sig. (1-tailed)	PADJember	.	.000
	IndstriPariwisata	.000	.
N	PADJember	12	12
	IndstriPariwisata	12	12

Tabel 5.22
Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	IndstriPariwisat a ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PADJember

Tabel 5.23
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.959 ^a	.919	.911	22643.325

a. Predictors: (Constant), IndstriPariwisata

b. Dependent Variable: PADJember

Tabel 5.24

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.828E10	1	5.828E10	113.662	.000 ^a
	Residual	5.127E9	10	5.127E8		
	Total	6.340E10	11			

a. Predictors: (Constant), IndstriPariwisata

b. Dependent Variable: PADJember

Tabel 5.25

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
		1	(Constant)	21868.796		
	IndstriPariwisata	17.642	1.655	.959	10.661	.000

a. Dependent Variable: PADJember

Tabel 5.26

Casewise Diagnostics^b

Case Number	tahun	Std. Residual	PADJember	Predicted Value	Residual	Status
1	2000	-.691	16984	32630.12	-15646.118	
2	2001	-.271	26438	32577.19	-6139.194	
3	2002	-.379	33105	41680.21	-8575.213	
4	2003	-.409	37592	46849.18	-9257.176	
5	2004	-.212	40910	45702.48	-4792.478	
6	2005	.031	51473	50765.59	707.408	
7	2006	.701	68448	52565.03	15882.974	
8	2007	.	78000	.	.	M ^a
9	2008	-.424	136471	146065.03	-9594.035	
10	2009	1.788	135022	94534.18	40487.819	
11	2010	.508	150956	139449.47	11506.532	
12	2011	-1.864	182494	224710.89	-42216.891	
13	2012	1.221	255805	228168.63	27636.372	
14	2013	.	.	232014.48	.	M ^a
15	2014	M ^a

a. Missing Case

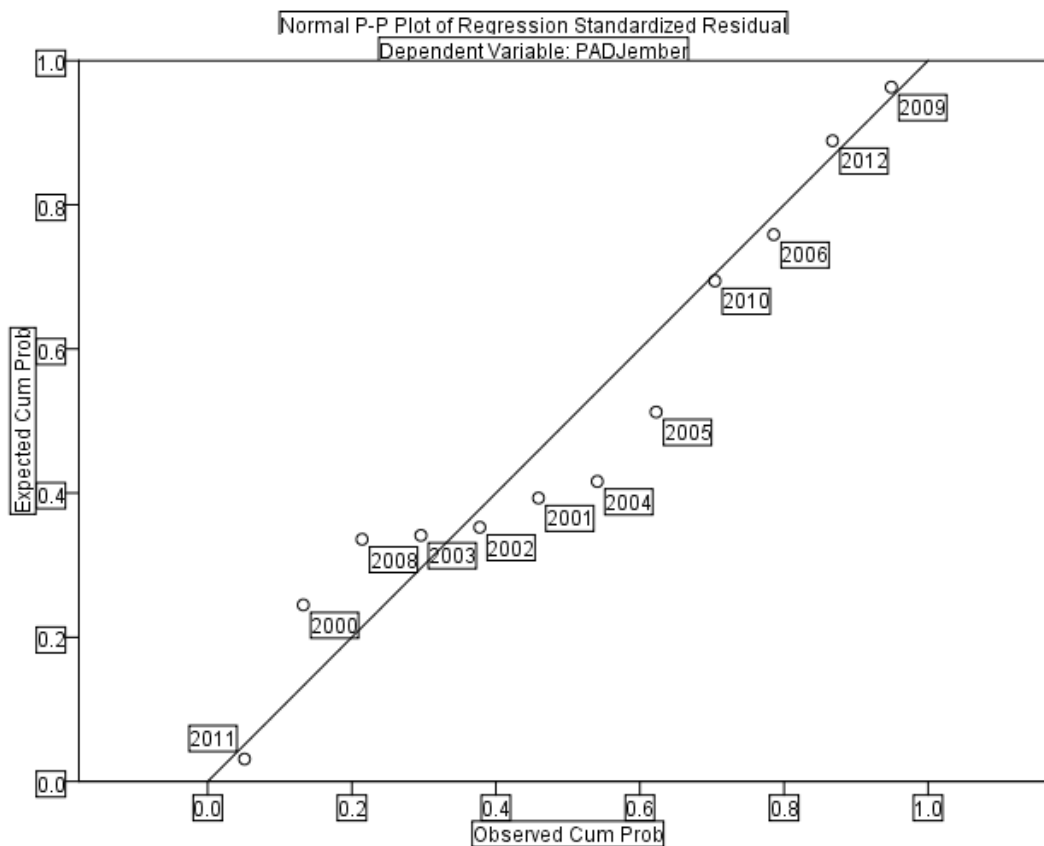
b. Dependent Variable: PADJember

Tabel 5.27
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	32577.19	228168.63	94641.50	72786.508	12
Residual	-42216.891	40487.820	.000	21589.563	12
Std. Predicted Value	-.853	1.835	.000	1.000	12
Std. Residual	-1.864	1.788	.000	.953	12

a. Dependent Variable: PADJember

Diagram Scatter PAD Kabupaten Jember:



Gambar 5.14 Grafik Scatter PAD Kabupaten

5.5 Faktor-faktor Pendorong berkembangnya Industri Pariwisata di Kabupaten Bandung dan Jember

Berdasarkan hasil wawancara dengan 60 wisatawan yang mengunjungi Kota dan Kabupaten Bandung, maka diperoleh hasil rekap wawancara tersebut yang dikelompokkan dalam bentuk factor-faktor SWOT (Strength, Weakness, Opprtunities, and threats) tentang pengembangan industry Pariwisata di Kabupaten Bandung.

Tabel SWOT Pengembangan Industri Pariwisata Kabupaten Bandung disajikan berikut ini.

Tabel 5. 28

SWOT Analysis Pengembangan Industri Pariwisata Kabupaten Bandung

<p>STRENGTH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pemandangan Alam yang indah, suasana pegunungan, udara yang sejuk. 2 Masyarakat ramah. 3 Kuliner khas Kab Bdg sangat lezat. 4 Seni & Budaya yg sangat menarik 5 Positioning Brand wisata memadai 6 Wisata utama: Belanja, Kuliner, Suvenir, FO. 	<p>WEAKNESSES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sampah belum dikelola dengan baik 2 Kebersihan area wisata belum memadai 3 Kenyamanan, Keamanan belum terjamin 4 Pedagang souvenir belum terkoordinasi 5 Perkir belum dikoordinasi 6 Kuliner di area tempat wisata blm dikoordinir 7 Pemandangan indah blm dipelihara 8 Belum ada fasilitas penyandang cacat 9 Belum ada pusat informasi, tempat permainan Tour guide, Peta lokasi 10 Infrastruktur belum memadai 11 Kesadaran masyarakat menjaga area wisata Belum memadai 12 Polusi belum dikelola 13 pemasaran perlu diperbaiki 14 Akomodasi perlu diperbaiki 15 Pengelolaan tempat wisata belum profesional 16 Kemacetan lalu lintas perlu diperbaiki
<p>OPPORTUNITIES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Terbukanya bantuan dana dari lembaga lain 2 Kesempatan meningkatkan pendidikan SDM Sektor pariwisata 3. Membuka wisata milik Pemerintah Daerah 4 Memperindah Kabupaten Bandung 5 mengembangkan Calon pengusaha kreatif 6 Kontribusi Masyarakat mengembangkan area Wisata 7 Potensi mempromosikan Keunggulan Kabupa Ten Bandung 8 Potensi kerjasama dengan pihak Swasta 9 Kesempatan mengadakan event khusus 10 Wisata Alam untu keluarga, Café untuk anak Muda 11 Membangun tempat Wisata baru 12 Pariwisata Kabupaten Bandung sebagai per- Panjangan tangan wisata Kota Bandung 	<p>THREATS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pariwisata Daerah lain lebih menarik 2 Masyarakat lebih menyukai pariwisata Luar Negeri 3 Perda tentang pariwisata daerah lain lebih Lengkap, teratur dan memadai 4 bencana alam semakin marak

Sumber: Hasil Pengolahan data 60 kuesioner



Gambar 5.15 Wisata Kabupaten Bandung: Maribaya Lembang

Sedangkan Tabel SWOT pengembangan Industri Pariwisata Kabupaten Jember disajikan di bawah ini.

Tabel 5.29

SWOT Analisis Pengembangan Industri Pariwisata Kabupaten Jember

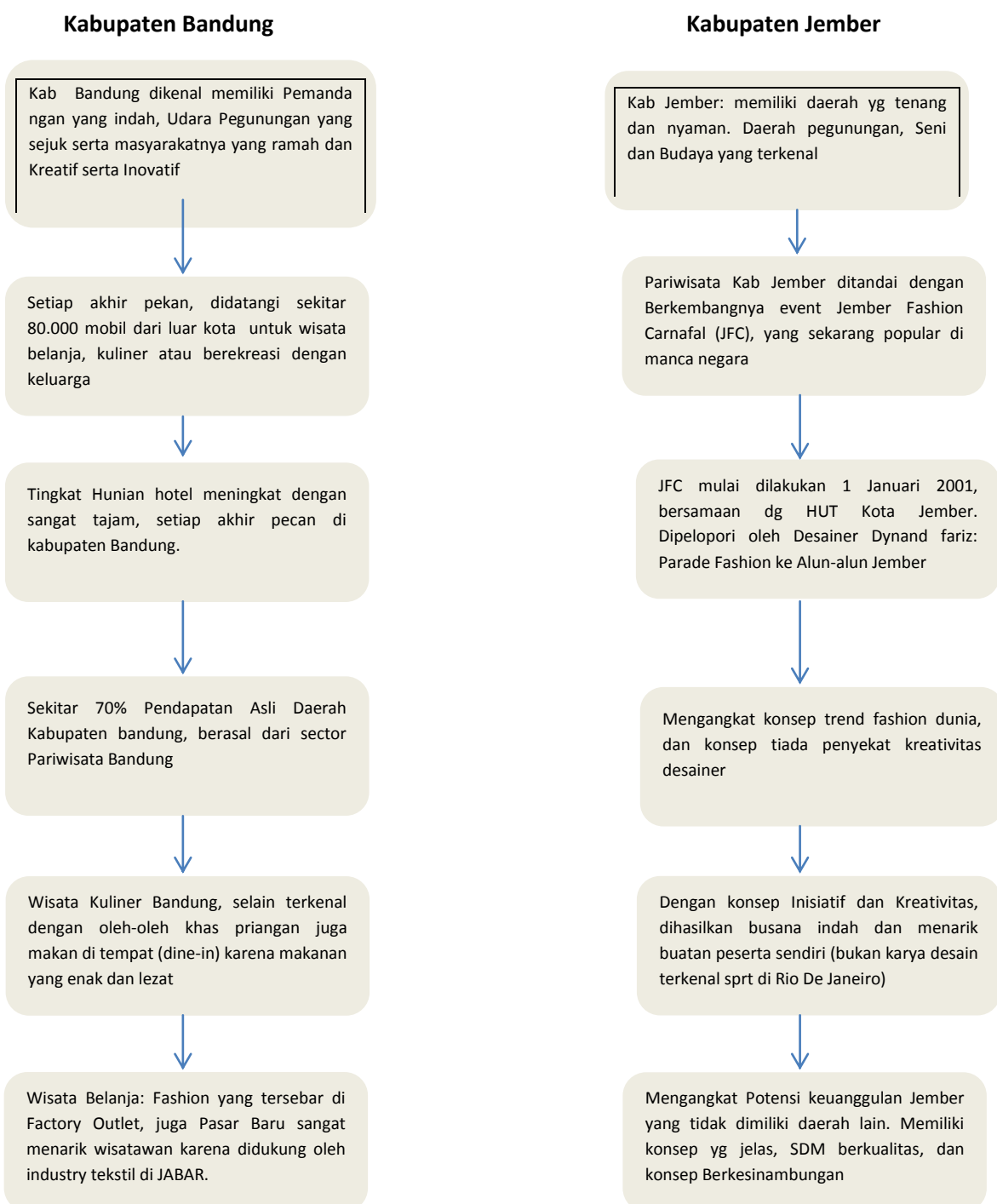
No	S (<i>Strength/ Kekuatan</i>)	No	W (<i>Weakness / Kelemahan</i>)
1	Kemampuan penciptaan margin ekonomi Mampu mengelola resiko pasar dan resiko produksi Banyaknya Objek Pariwisata Alam dan Buatan	1	Sarana terhadap objek wisata relatif kurang memadai Kurangnya informasi tentang objek pariwisata yang dimiliki Tidak adanya standar kualitas
2			
3			
No	O (<i>Opportunity/ Peluang</i>)	No	T (<i>Threat/ Ancaman</i>)
1	Lokasi Kabupaten Jember memiliki kondisi geografis yang cukup potensial karena dilewati oleh jalur provinsi menuju Pulau Bali Infrastruktur yang cukup menunjang sebagai entry point Berkembangnya teknologi dalam menunjang pelayanan publik Pangsa pasar yang cukup luas dan semakin mengalami peningkatan setiap tahunnya Program tahunan pemerintah Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ)	1	Iklim ekonomi yang kurang mendukung Kelembagaan ekonomi kedepan yang belum tumbuh Sadar wisata yang relatif masih rendah Meningkatnya daya saing skala nasional dan internasional
2			
3			

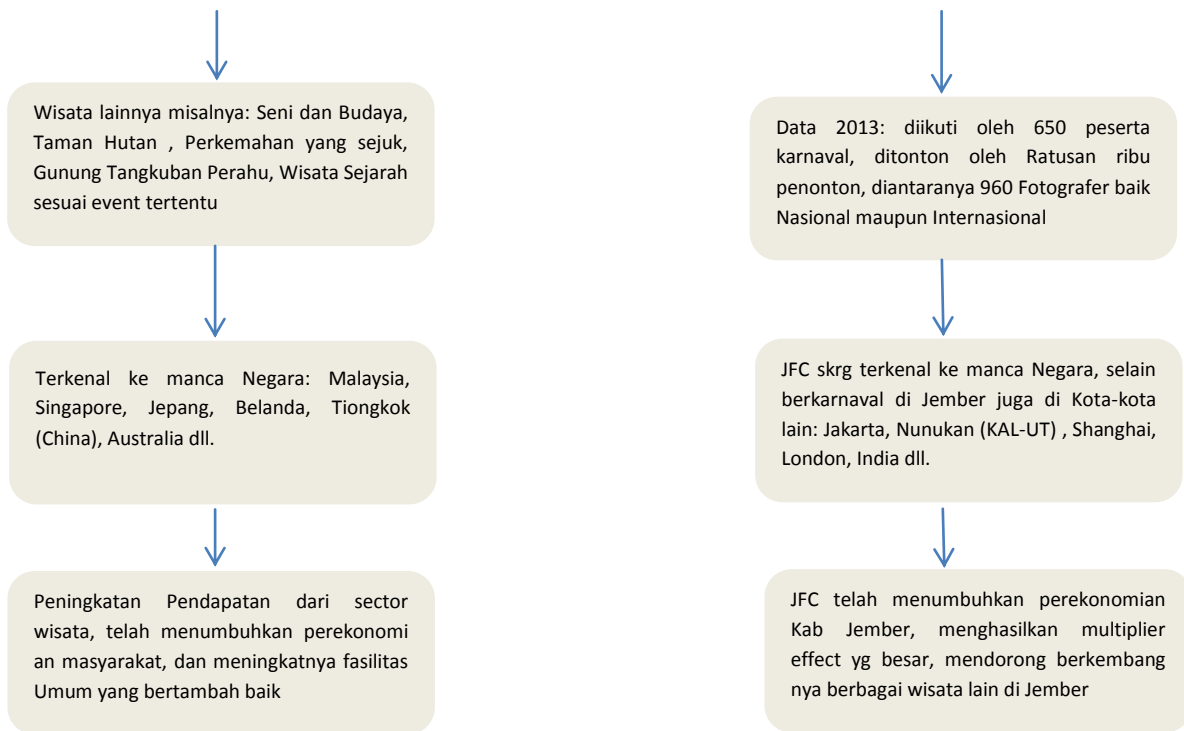
4			
---	--	--	--

Sumber: Hasil Pengolahan data

Di bawah ini juga ditunjukkan berbagai karakteristik yang menjadi ciri pariwisata kabupaten Bandung dan Kabupaten Jember, yaitu sebagai berikut ini.

Karakteristik Komparatif Sektor Wisata di Kabupaten Bandung dan Jember





Sumber:

- Harian PR beberapa terbitan
- Harian Kompas beberapa terbitan
- Harian Bisnis Bandung beberapa terbitan
- www.Bandung.kab.com
- Events.goindonesia.com/?event=jember.fashion.carnaval.2013
- Jember.fashion.carnaval.com
- www.tempo.co/read/news/2012/708/200415594/ashanty tampil di festival jember
- Jfc.com
- Rosiesmard.blogspot.com/2013/10/jember.fashion.carnaval9.html

Skema 4.1 Perbandingan Karakteristik Sektor Pariwisata Kabupaten Bandung dan Jember

Penjelasan atas Skema di atas menunjukkan bahwa karakteristik sektor pariwisata di kedua Kabupaten sangatlah berbeda. Karakteristik tersebut barulah karakteristik secara umum.

Karakter-karakter yang sangat menarik dari kedua Kabupaten yakni Bandung dan Jember bahwa keduanya berdasar pada konsep mengembangkan keunggulan lokal yang tidak dimiliki Kabupaten lain, dengan senantiasa mengembangkan kreativitas, dan inovasi, dengan Sumber Daya Manusia yang berinisiatif, dan berkualitas, serta mengupayakan mempertahankan konsep kesinambungan. Hal inilah yang telah menghasilkan Pendapatan kedua Kabupaten yang meningkat

sangat besar, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan peningkatan fasilitas umum yang semakin baik.

Usulan Kebijakan Pengembangan Industri Pariwisata Kabupaten Bandung dan Kabupaten Jember

Berdasarkan evaluasi dan analisis terhadap SWOT Kabupaten Bandung dan Jember, yang merupakan hasil wawancara dan kuesioner terhadap para wisatawan (60 orang di Kabupaten Bandung) serta wisatawan Kabupaten Jember, maka diperoleh berbagai strategi yang dapat digunakan oleh masing-masing kabupaten untuk mengembangkan sektor pariwisatanya. Strategi kebijakan yang diusulkan adalah sebagai berikut di bawah ini.

Usulan Kebijakan Pengembangan Industri Pariwisata Kabupaten Bandung.

- (a) Pengembangan Industri Pariwisata Kabupaten Bandung diprioritaskan untuk mengembangkan potensi pariwisata berbasis Alam, Kuliner, Seni dan Budaya serta wisata Belanja yang berfokus pada keunggulan Kabupaten Bandung
- (b) Mengembangkan aspek transportasi dan Akomodasi: Bandara yang memadai, akses ke tempat wisata, Hotel, penginapan, Restoran, tempat permainan anak (khusus kebutuhan yang diminta anak-anak), wi-fi (khusus kebutuhan yang diminta wisatawan remaja dan dewasa), dan lain-lain
- (c) Meningkatkan kesadaran warga menjaga Area Wisata, dan pendidikan untuk SDM sektor Pariwisata; Kebersihan, keamanan, kenyamanan, pusat informasi
- (d) Pariwisata Kabupaten Bandung sebagai Perpanjangan tangan Pariwisata Kota Bandung
- (e) Kerjasama Pengelolaan Pariwisata dengan pihak Swasta, Perda tentang pariwisata dikembangkan
- (f) Mengembangkan promosi (melalui berbagai media misalnya internet).

Usulan Kebijakan Pengembangan Industri Pariwisata Kabupaten Jember

- (a) Melakukan peningkatan promosi dan informasi tentang potensi pariwisata yang dimiliki kepada masyarakat luas baik skala nasional maupun internasional
- (b) Melakukan peningkatan manajemen pengelolaan pariwisata untuk meningkatkan standar kualitas dan meningkatkan daya saing skala nasional maupun internasional
- (c) Melakukan peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak dengan tujuan guna menunjang perkembangan sektor pariwisata
- (d) Melakukan peningkatan kemampuan penciptaan margin ekonomi dan peningkatan pengelolaan resiko pasar dan resiko produksi sehingga dapat menciptakan iklim ekonomi

yang lebih kondusif serta dapat menciptakan pertumbuhan kelembagaan ekonomi kedepan dibidang pariwisata khususnya.

- (e) Melakukan peningkatan sarana pada objek pariwisata sehingga akan memberikan dampak pada peningkatan standar kualitas pariwisata
- (f) Melakukan peningkatan program kepariwisataan guna menarik minat wisatawan seperti melakukan peningkatan sadar wisata bagi masyarakat

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan atas Perbandingan Kontribusi Industri Wisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung dan Jember, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Jember selama periode 2000 – 2014, terlihat meningkat secara signifikan. Pada PAD Kabupaten Bandung, Tahun 2000 jumlah PAD kabupaten Bandung masih sekitar Rp 50 milyar, disusul terjadinya kenaikan yang signifikan tahun 2004 yaitu naik 100%, serta naik lagi tahun 2011 sebesar 100% pula, dan pada tahun 2014 diharapkan PAD mencapai 0,5 Triliun Rupiah seperti yang dianggarkan pada penerimaan anggaran PAD sebesar Rp 512.623 (dalam Juta Rupiah) yaitu meningkat 10 kali lipat dibandingkan tahun 2000.

Sedangkan untuk kabupaten Jember konfigurasi PAD berkisar dari Rp 17 milyar pada Tahun 2000, dan naik menjadi Rp 256 milyar pada Tahun 2012.

2 Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandung menggunakan Software SIMPATDA, yang memenuhi prinsip keadilan, proporsional, demokratis, transparan, bertanggung jawab. Tujuan penggunaan PAD untuk pendidikan masyarakat, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan suprastruktur, untuk melindungi, melayani, dan memberi fasilitas yang lebih baik. Pengendalian yang baik khususnya telah dihasilkannya pelaporan yang relevan dan reliabel, sehingga transparansi pelaporan kepada stakeholders' semakin baik dan pengambilan keputusan users dapat semakin tepat karena wajib pajak dapat mengetahui pajak mereka dari informasi Dispenda. Pengendalian lain yang dihasilkan adalah lebih banyaknya admin yang dapat mengakses dan memproses data, selain juga karena akses dibatasi maka dapat dihindarkan akses data oleh sembarang pegawai. Sistem berbasis web ini memudahkan atas akses sistem baik oleh Dispenda maupun oleh wajib pajak. Pengendalian ini menghasilkan lengkapnya pendapatan yang diterima dan dicatat khususnya dari daerah wisata.

3 Kontribusi industri pariwisata terhadap PAD Kabupaten Bandung dapat dijelaskan bahwa pengaruh pendapatan industri pariwisata terhadap PAD Kabupaten Bandung sebesar 16,34% yang signifikan secara statistic dengan significant level sebesar 0,002 (lebih kecil dari $\alpha = 0,05$) Hal ini berarti bila terdapat kenaikan pendapatan industri pariwisata sebesar satu satuan Rupiah, maka PAD kabupaten Bandung akan meningkat sebesar Rp 16,34%.

Sedangkan Kontribusi industri pariwisata terhadap PAD Kabupaten Jember dapat dijelaskan bahwa pengaruh pendapatan industri pariwisata terhadap PAD Kabupaten Jember sebesar 17,64% yang signifikan secara statistic dengan significant level sebesar 0,000 (lebih kecil dari $\alpha = 0,05$) Hal ini berarti bila terdapat kenaikan pendapatan industri pariwisata sebesar satu satuan Rupiah, maka PAD kabupaten Jember akan meningkat sebesar Rp 17,64%.

Dari uraian tersebut, nampak bahwa pengaruh pendapatan dari industri pariwisata sangat signifikan sehingga bila sektor pariwisata dikembangkan dengan efektif diharapkan dapat meningkatkan pendapatan industri pariwisata serta pada gilirannya akan meningkatkan PAD Kabupaten Bandung dan Jember secara signifikan pula.

Hasil perhitungan korelasi (Pearson Correlation) atas hubungan pendapatan industri pariwisata dengan PAD Kabupaten Bandung dan Jember menghasilkan nilai sebesar 77% dan sebesar 95,9%, yang artinya High Correlation atau hubungan pendapatan industry pariwisata baik di kabupaten Bandung maupun di kabupaten Jember sangatlah erat.

4 Usulan Kebijakan Pengembangan Industri Pariwisata Kabupaten Bandung.

- (a) Pengembangan Industri Pariwisata Kabupaten Bandung diprioritaskan untuk mengembangkan potensi pariwisata berbasis Alam, Kuliner, Seni dan Budaya serta wisata Belanja yang berfokus pada keunggulan Kabupaten Bandung
- (b) Mengembangkan aspek transportasi dan Akomodasi: Bandara yang memadai, akses ke tempat wisata, Hotel, penginapan, Restoran, tempat permainan anak (khusus kebutuhan yang diminta anak-anak), wi-fi (khusus kebutuhan yang diminta wisatawan remaja dan dewasa), dan lain-lain
- (c) Meningkatkan kesadaran warga menjaga Area Wisata, dan pendidikan untuk SDM sektor Pariwisata; Kebersihan, keamanan, kenyamanan, pusat informasi
- (d) Pariwisata Kabupaten Bandung sebagai Perpanjangan tangan Pariwisata Kota Bandung
- (e) Kerjasama Pengelolaan Pariwisata dengan pihak Swasta, Perda tentang pariwisata dikembangkan
- (f) Mengembangkan promosi (melalui berbagai media misalnya internet).

Usulan Kebijakan Pengembangan Industri Pariwisata Kabupaten Jember

- (a) Melakukan peningkatan promosi dan informasi tentang potensi pariwisata yang dimiliki kepada masyarakat luas baik skala nasional maupun internasional
- (b) Melakukan peningkatan manajemen pengelolaan pariwisata untuk meningkatkan standar kualitas dan meningkatkan daya saing skala nasional maupun internasional
- (c) Melakukan peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak dengan tujuan guna menunjang perkembangan sektor pariwisata
- (d) Melakukan peningkatan kemampuan penciptaan margin ekonomi dan peningkatan pengelolaan resiko pasar dan resiko produksi sehingga dapat menciptakan iklim ekonomi yang lebih kondusif serta dapat menciptakan pertumbuhan kelembagaan ekonomi kedepan dibidang pariwisata khususnya.
- (e) Melakukan peningkatan sarana pada objek pariwisata sehingga akan memberikan dampak pada peningkatan standar kualitas pariwisata
- (f) Melakukan peningkatan program kepariwisataan guna menarik minat wisatawan seperti melakukan peningkatan sadar wisata bagi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Ardika, I gede. [2003]. *Konsepsi Pembangunan Kepariwisata Indonesia*. Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia

Arsyad, Lincolin.[1990]. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : BPFE

Aryad, Lincolin. [1997]. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : BPSTIE YKPN

Belkaoui, AR [2003], *"The Impact of Corporate Social Responsibility on The Informativeness of Earning and Accounting Choices"*.Journal of Advances in Environment Accounting and Management Vol 2 pp 121-136

Burke, L and Logsdon [1996] *"How Corporate Social Responsibility pays off"*, Long Range Planning Vol 29, No. 4, pp 495-502

BiRMS. [2013] *Bandung Integrated Resources management System*: <http://birms.bandung.go.id>

Hally, Mario Hadiwijaya.[2009].*Peranan Sektor Pariwisata Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 – 2006*. Skripsi tidak dipublikasikan. Jember : FE Universitas Jember

Iqbal, M. Zafar, [2002], *"International Accounting: A Global Perspective"* 2nd edition, South Western Publisher

Manurung, Elizabeth Tiur. [2014]. *"The Information System Control To Increase Local Income of Bandung City"*. Proceeding The 2nd IBEA Conference, CAAL, Hongkong

Manurung, Elizabeth Tiur.[2013]. *"Pengendalian Sistem Informasi Pendapatan di Sektor Green Wisata untuk Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kota Bandung)"*. Pada Proceeding Seminar Nasional Green Pariwisata, Universitas Mataram Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Medley, Patrick [1997], *"Environmental Accounting-What Does It Means to Professional Accountants?"*, Journal of Accounting, Auditing & Accountability. Vol. 10 No. 4 pp. 594-600

Oktaryani , GA Sri. [2013]. *"Peranan Sektor wisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara"* Pada Proceeding Seminar Nasional Green Pariwisata, Universitas Mataram Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 07 Tahun 2003. [2003]. tentang *"Biaya Pemungutan Pendapatan Asli Daerah"*. Daerah Kota Bandung, 13 Mei 2003

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Santoso, Siswoyo Hari. [2013]. *"Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat berbasis Pariwisata dan Ekonomi Kerakyatan, melalui Bulan Berkunjung ke Jember ""* Pada Proceeding Seminar Nasional Green Pariwisata, Universitas Mataram Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Saleh,M. [2007]. Pengantar Statistik Ekonomi I. Jember : Center For Society Studies

Sekaran, Uma dan Rouger Bougie (2010) Edisi 5. *Research Method for Business: ASkill-Building Approach*. New York: John Wiley & Sons Inc.

Suwarni, Emi. [2013] . *“Peran Pariwisata terhadap Perekonomian dalam upaya mengurangi Kemiskinan “* Pada Proceeding Seminar Nasional Green Pariwisata, Universitas Mataram Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Tarigan, Robinson.[2005]. *Ekonomi Regional dan Aplikasi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Trisnawati, Rina., Wiyadi.,Priyono, Edy. *Jurnal Ekonomi Pembangunan – Analisis Daya Saing Industri Pariwisata Untuk meningkatkan Ekonomi Daerah*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ulandari Desi, Siti Komariah, Regina Niken. [2013]. *“Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD dan Kebijakan Pengembangannya”*. Pada Proceeding Seminar Nasional Green Pariwisata, Universitas Mataram Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Undang-Undang No 18 Tahun 1997 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD) tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*.

Wulan, Ratna Indradewi. [2005]. *Prospek Potensi Sektor Pariwisata Di Kabupaten Jember*. Skripsi tidak dipublikasikan. Jember : FE Universitas Jember

Yoeti, Oka A. 1987. (a). *Manajemen Pariwisata* . Bandung : Angkasa.

..... 1990. (b). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung : Angkasa

..... 1991. (c). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung : Angkasa

<http://hukum2industri.wordpress.com/2011/04/26/pendapatan-asli-daerah-pad>.

Harian PR beberapa terbitan

Harian Kompas beberapa terbitan

Harian Bisnis Bandung beberapa terbitan

www.Bandung.kab.com

Events.goindonesia.com/?event=jember.fashion.carnaval.2013

Jember.fashion.carnaval.com

www.tempo.co/read/news/2012/708/200415594/ashanty tampil di festival jember

Jfc.com

Rosiesmard.blogspot.com/2013/10/jember.fashion.carnaval9.html

